



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (IKJIP)  
TAHUN 2018

BAGIAN ORGANISASI SETDAKO PADANG PANJANG  
TAHUN 2018



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang untuk tahun anggaran 2018 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 25 Maret 2019





# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kota Padang Panjang Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan implementasi tahun kelima Peraturan Daerah Kota Padang panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018

Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2018 merupakan salah satu bentuk implementasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas wewenang Pemerintah Kota padang Panjang kepada Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berlandaskan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah teknis penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekaitan dengan itu, dalam laporan ini disajikan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran kinerja yang terdapat pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018, dimana selama tahun 2018 capaian kinerja yang telah ditargetkan secara umum telah berhasil dicapai dengan baik.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang sehingga Kota Padang Panjang dapat mewujudkan capaian kinerja yang dibutuhkan. Berkennaan dengan itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang Panjang, 22 Maret 2019  
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN, BBA

# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Gambar	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
D. Capaian Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang	10
E. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	17
F. Sistematika Penyusunan	18
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2013 – 2018	20
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
C. Perjanjian Kinerja	26
BAB 3 AKUNTANBILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang	28
B. Realisasi Keuangan	71
BAB 4 PENUTUP	
Kesimpulan	83
LAMPIRAN	

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017	4
Tabel 1.2	Luas wilayah, penduduk, dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan/kelurahan Kota Padang Panjang	5
Tabel 1.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang 2017	6
Tabel 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2013 -2017	7
Tabel 1.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2013-2017	10
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2018	18
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018	26
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	29
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018	29
Tabel 3.3	Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	32
Tabel 3.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Kota Padang Panjang	34
Tabel 3.5	Komponen Penilaian LKjIP	37
Tabel 3.6	Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Angka Melek Huruf pada Usia 7 Tahun Keatas	40
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Angka Melek Huruf	41
Tabel 3.8	Pencapaian Sasaran Strategis 3 Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun	42
Tabel 3.9	Pencapaian Sasaran Strategis 4 Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini	44
Tabel 3.10	Pencapaian Sasaran Strategis 5 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	46
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja Sasaran PHBS	47
Tabel 3.12	Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	53
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Status Gizi Kurang	54
Tabel 3.14	Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	54

Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi	56
Tabel 3.16	Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	57
Tabel 3.17	Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya PDRB Sektor Tersier	58
Tabel 3.18	Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Nilai Investasi	60
Tabel 3.19	Pencapaian Sasaran Strategis 11 Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	62
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan	64
Tabel 3.21	Perbandingan Capaian Angka Pengangguran	65
Tabel 3.22	Pencapaian Sasaran Strategis 12 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penerapan ABS SBK	66
Tabel 3.23	Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatkan Prestasi Olahraga	68
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Indeks Development Gender	69
Tabel 3.25	Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender	69
Tabel 3.26	Pencapaian Sasaran Strategis 14 Menekan Angka Kelahiran	70
Tabel 3.27	Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun Anggaran	71
Tabel 3.28	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 Per 31 Desember 2018	78
Tabel 3.29	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Per 31 Desember 2018	80
Tabel 3.30	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 Per 31 Desember 2018	81

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang  
2012-2016

10

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Peta Kota Padang Panjang

3

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang ini berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.
5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang

6. Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
7. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 061/80.a/WAKO-PP/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 061/31/WAKO-PP/2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018
8. Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2018

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2013-2018 .

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

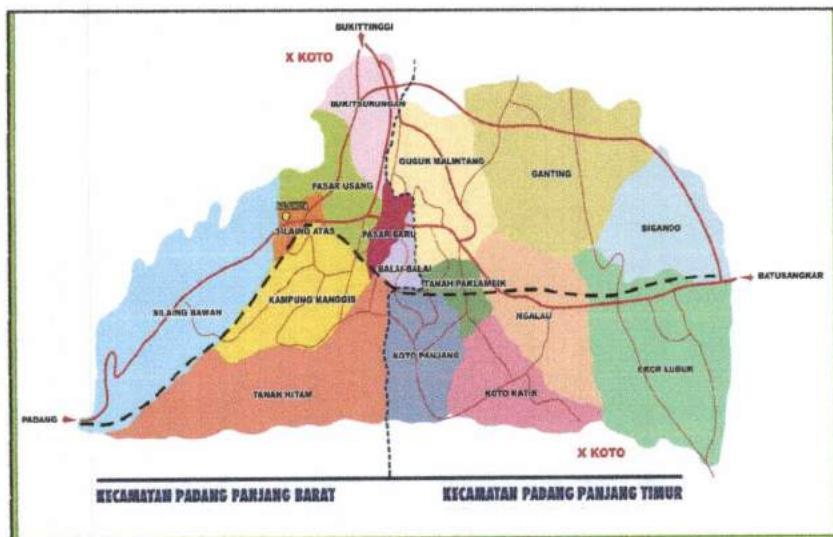
1. Sebagai laporan Pemerintah Kota Padang Panjang mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2018.

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2018.
3. Untuk alat kendali/ *controlling* bagi Kepala Daerah untuk mendorong peningkatkan kinerja setiap unit Organiasi.
4. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.

### C. GAMBARAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

#### Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Padang Panjang merupakan kota terkecil dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha atau sekitar 0,05% dari luas Sumatera Barat, terletak antara  $100^{\circ} 30'$  Bujur Timur serta  $0^{\circ} 32'$  Lintang Selatan. Kota Padang Panjang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar dan diapit oleh Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh yang merupakan dua wilayah dari Kabupaten Tanah Datar



Gambar Peta Padang Panjang

Secara administrasi Kota Padang Panjang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas 2300 Ha, masing-masing kecamatan memiliki delapan kelurahan. Padang Panjang memiliki topografi bergelombang dengan ketinggian antara 650 sampai 850 meter dari permukaan laut, diapit oleh tiga gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat serta memiliki curah hujan selama 2017 mencapai 5236,8 mm.

### Kondisi Demografis

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2010-2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang Tahun 2018 jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2017 adalah 52.422, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 26.202 dan penduduk perempuan 26.220. Berikut ini rincian perkiraan jumlah penduduk Kota Padang Panjang tahun 2017, adalah :

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No	Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	<b>Padang Panjang Barat</b>	Silaing Bawah	14.471	14.577	29.048
		Silaing Atas	2.550	2.721	5.271
		Pasar Usang	1.093	963	2.056
		Kampung Manggis	1.807	2.111	3.918
		Tanah Hitam	2.920	2.717	5.637
		Pasar Baru	1.605	1.611	3.216
		Bukit Surungan	684	634	1.318
		Balai-Balai	1.173	1.106	2.279
			2.639	2.714	5.353
2.	<b>Padang Panjang Timur</b>		11.731	11.643	23.374
		Koto Panjang	2.627	2.501	5.128
		Koto Katik	441	433	874
		Ngalau	1.338	1.319	2.657
		Ekor Lubuk	1.271	1.213	2.484
		Sigando	772	743	1.515
		Ganting	1.038	1.084	2.122
		Guguk Malintang	3.291	3.473	6.764
		Tanah Pak Lambik	953	877	1.830

*Sumber :Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018*

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam menyusun kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Tabel 1.2

Luas wilayah, penduduk, dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan/Kelurahan di Kota Padang Panjang

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah	Penduduk	Kepadatan
1.	<b>Padang Panjang Barat</b>		<b>9,75</b>	<b>29.048</b>	<b>2.979</b>
		Silaing Bawah	2,61	5.271	2.020
		Silaing Atas	0,54	2.056	3.807
		Pasar Usang	0,59	3.918	6.641
		Kampung Manggis	3,16	5.637	1.784
		Tanah Hitam	0,72	3.216	4.467
		Pasar Baru	0,23	1.318	5.730
		Bukit Surungan	1,21	2.279	1.883
		Balai-Balai	0,69	5.353	7.758
2.	<b>Padang Panjang Timur</b>		<b>13,25</b>	<b>23.374</b>	<b>1.764</b>
		Koto Panjang	1,33	5.128	3.856
		Koto Katik	1,01	874	865
		Ngalau	1,45	2.657	1.832
		Ekor Lubuk	2,8	2.484	887
		Sigando	1,4	1.515	1.082
		Ganting	3,1	2.122	685
		Guguk Malintang	1,9	6.764	3.560
		Tanah Pak Lambik	0,26	1.830	7.038

Sumber :Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat **SLTA/sederajat** dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Padang Panjang 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/belum pernah sekolah	0,22	0,10	0,16
Tidak/belum tamat SD	15,08	15,70	15,39
SD/sederajat	14,84	11,49	13,14
SLTP/sederajat	21,08	23,16	22,13
SLTA/sederajat	35,18	28,37	31,74
Diploma I/II/III	3,52	6,94	5,25
Diploma IV/S1	9,47	13,74	11,63
S2/S3	0,62	0,50	0,56

Sumber :Kota Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018

### Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator yang penting untuk menunjukkan keberhasilan kinerja Pemerintahan Daerah. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan semakin bagus pula kinerja pemda di daerah itu. Pertumbuhan ekonomi kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 tampaknya agak berfluktasi. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 5,81 %.

Sedangkan secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode 2013-2017 adalah mencapai sebesar 5,98 %. Kondisi yang demikian bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan rata-rata PDRB Provinsi Sumatra Barat maupun PDB Indonesia, ternyata secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang lebih besar karena selama periode 2013-2017 tersebut laju pertumbuhan ekonomi

Sumatra Barat dan Indonesia secara rata-rata masing-masing hanya mencapai sebesar 5,72 % dan 4,96 %.

Selanjutnya bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, selama periode 2013-2017 terdapat beberapa lapangan usaha utama yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, antara lain: Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan rata-rata: 7,69%, sektor Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan rata-rata: 8,37%, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pertumbuhan sebesar 8,590%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa beberapa sektor lapangan usaha tersebut memiliki potensi yang bagus untuk ditumbuh kembangkan pada masa yang akan datang dalam rangka mendorong pertumbuhan PDRB Kota Padang Panjang. Disamping sektor PDRB seperti diatas, sektor PDRB yang lain juga memiliki potensi dan prospek yang cerah untuk dikembangkan dimasa mendatang adalah sektor jasa konstruksi dengan pertumbuhan rata-rata 7,73%, sektor transportasi dan pergudangan dengan dengan pertumbuhan rata-rata 7,53% serta penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,33%, seperti terlihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 1.4  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang Berdasarkan Lapangan Usaha  
Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,28	3,37	2,34	1,99	2,79	2,55
B.	Pertambangan dan Penggalian	6,96	5,43	7,21	0,40	0,46	4,09
C.	Industri Pengolahan	5,83	7,23	2,07	4,49	2,19	4,36
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,56	12,31	3,48	9,93	4,14	7,69

E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	8,79	4,27	4,98	0,30	2,07	4,08
F.	Konstruksi	11,77	6,38	7,22	5,19	8,08	7,73
G.	Perdagangan Besar dan Enceran ;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	5,62	5,04	6,17	4,57	5,56
H.	Transportasi dan Pergudangan	8,97	7,66	7,83	6,57	6,64	7,53
I.	Penyediaan Akomodasi dan makan minim	5,15	8,59	8,18	7,25	7,48	7,33
J.	Informasi dan komunikasi	4,31	9,98	10,83	7,85	8,88	8,37
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,51	7,06	4,94	6,35	2,16	5,40
L.	Real Estate	4,04	4,73	4,46	3,53	4,51	4,25
M.	Jasa Perusahaan	7,85	7,64	7,15	5,19	6,88	6,94
N.							
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,48	8,65	6,82	6,24	6,21	7,28
P.	Jasa Pendidikan	1,74	1,07	3,69	4,57	4,96	3,21
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,29	6,84	9,58	8,15	10,11	8,60
R.	Jasa Lainnya	7,03	3,28	4,08	6,59	7,61	5,72
S.							

T.						
U.						
Produk Domestik Regional Bruto	6,29	6,08	5,91	5,80	5,81	5,98

*Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018, data di olah*

Bila diperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang secara rata-rata selama periode 2013-2017 tampaknya berada di atas laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukan kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi Kota Padang Panjang lebih bagus di bandingkan dengan kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi Sumatera Barat. Akan tetapi perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang berfluktuasi selama periode 2013-2017.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mencapai sebesar 6,29%. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami penurunan sampai tahun 2016 dimana hanya mencapai sebesar 5,80%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ternyata juga turun menjadi 5,40%. Pada tahun 2017 perekonomian Kota Padang Panjang naik kembali menjadi 5,81% dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga naik menjadi 5,69%.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang naik menjadi 5,81% pada tahun 2017 dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat naik menjadi 5,69% ternyata akselerasi kenaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sedikit lebih baik dibandingkan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:



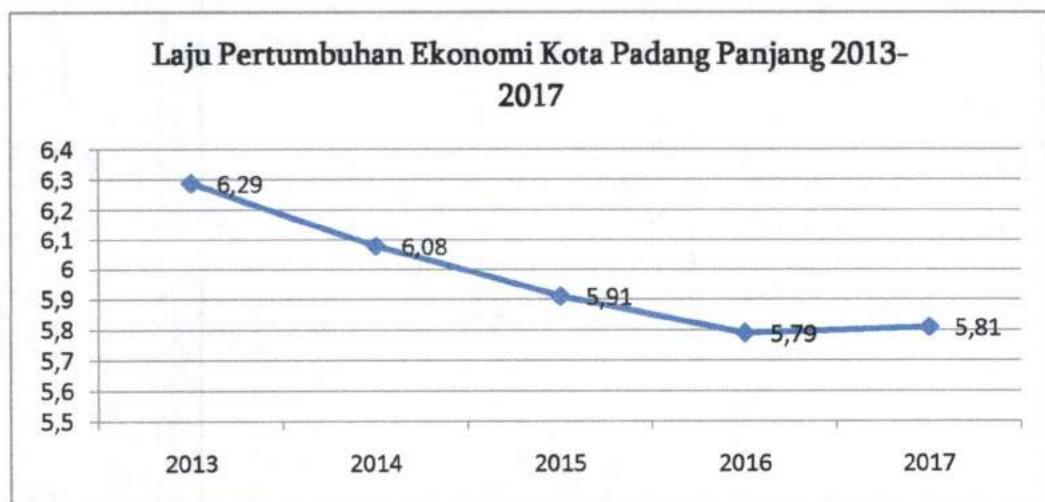
Tabel 1.5

Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2013-2017 (%)

Tahun	Padang Panjang	Provinsi Sumbar
2013	6,29	6,02
2014	6,08	5,85
2015	5,91	5,47
2016	5,80	5,40
2017	5,81	5,69
Rata-rata	5,98	5,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2018, data diolah

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang 2013-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

**Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah Kota membantu

Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD Kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota, Sekretariat DPRD Kota dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota yang dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh dengan Keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD Kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya dengan kebutuhan, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota dan
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota.

## **Inspektorat**

Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Dinas Daerah**

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesua dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Dinas Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintah bidang Pemuda dan Olahraga serta urusan pemerintah bidang Kebudayaan.
- 2) Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perumuhan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 9) Dinas Komunikasi dan Dinas Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
- 11) Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- 13) Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Perikanan; dan
- 14) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

### **Badan Daerah Kota**

Badan Daerah Kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Badan Daerah Kota dipimpin oleh Kepala Badan Daerah Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Badan Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

- 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Badan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; dan
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

### **Kecamatan**

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Adapun Kecamatan yang ada di lingkungan : Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B,
- 2) Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah diatur dengan Perwako No. 29/2016
2. Sekretariat DPRD diatur dengan Perwako No. 30/2016
3. Inspektorat Daerah diatur dengan Perwako No. 31/2016
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diatur dengan Perwako No. 32/2016
5. Dinas Kesehatan diatur dengan Perwako No. 33/2016
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Perwako No. 34/2016
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dengan Perwako No. 35/2016

8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Perwako No. 36/2016
9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Perwako No. 37/2016
10. Dinas Perhubungan diatur dengan Perwako No. 38/2016
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Perwako No. 39/2016
12. Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Perwako No. 40/2016
13. Dinas Penanaman modal dan PTSP diatur dengan Perwako No. 41/2016
14. Dinas Pariwisata diatur dengan Perwako No. 42/2016
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Perwako No. 43/2016
16. Dinas Pangan dan Pertanian diatur dengan Perwako No. 44/2016
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Perwako No. 45/2016
18. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur dengan Perwako No. 46/2016
19. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Perwako No. 47/2016
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM diatur dengan Perwako No. 48/2016
21. Kecamatan Padang Panjang Barat diatur dengan Perwako No. 49/2016
22. Kecamatan Padang Panjang Timur diatur dengan Perwako No. 49/2016
23. BPBD dan Kesbangpol diatur dengan Perwako No. 49/2010
24. Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Perwako No.41/2010

#### E. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil

Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan data SIMPEG Tahun 2018 sebanyak 2004 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 778 orang dan perempuan sebanyak 1226 orang.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang**  
**berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2018**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	SD/Sederajat	13	1
2.	SLTP/Sederajat	34	2
3.	SLTA/Sederajat	241	175
4.	Diploma I	2	24
5.	Diploma II	10	75
6.	Diploma III	72	288
7.	Diploma IV	10	10
8.	Strata I	332	605
9.	Strata II	66	45
10.	Strata III	2	1
Total		778	1226
Total Keseluruan		2004	

*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2018*

#### F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

## **BAB I.PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Personil Perangkat Daerah, Capaian Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang dan Permasalahan Utama, serta Sistematika Penyusunan.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018; pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 dan tahun 2018. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target 2018 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2013 sampai tahun 2018; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

## **BAB IV.PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018

Rencana strategis merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi masa datang dengan memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada. Untuk instansi pemerintah, rencana strategis tersebut memuat antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategis kebijakan dan program serta ukuran capaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Perencanaan strategis tersebut secara umum mengandung makna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, potensi, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagai organisasi publik, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menyusun dan menetapkan rencana strategis. Ini menjadi penting karena dengan adanya Rencana Strategis tersebut, akan dapat diketahui sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Rencana strategis tersebut adalah berupa RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 serta Renstra SKPD. Beberapa variabel rencana strategis yang dikemukakan dalam Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang tahun 2018 ini mengacu kepada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018. Variabel strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

## Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga. Adapun rumusan visi Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut "**PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA**".

Dari Visi Kota Padang Panjang yang telah disepakati tersebut, ada beberapa hal pokok dan makna yang perlu dipahami yaitu antara lain:

- 1) Padang Panjang **Amanah** memiliki makna pemerintah daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku;
- 2) Padang Panjang **Aman** memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu: Masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri;
- 3) Kehidupan yang **Sejahtera** menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

## Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang.

Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
- 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami;
- 3) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;

- 5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
- 6) Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya.

## Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dapat juga dikatakan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Memahami hal tersebut dan sesuai dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 beberapa tujuan yang hendak diwujudkan adalah:

**Misi Pertama Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN bertujuan untuk:**

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien
- 2) Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN

**Misi Kedua adalah Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan Islami memiliki tujuan sebagai berikut:**

- 1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- 2) Membangun Kecerdasan Islami pada Usia Dini
- 3) Meningkatkan Kualitas SDM yang Islami
- 4) Mendorong perkembangan layanan perguruan tinggi
- 5) Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia Industri.

**Misi Ketiga yakni Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk:**

- 1) Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- 3) Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B dan tempat pendidikan

**Misi Keempat yaitu Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah bertujuan untuk:**

- 1) Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa
- 2) Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global
- 3) Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi.

**Misi Kelima yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup bertujuan untuk:**

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan infrastruktur kota.
- 3) Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan.

**Misi Keenam yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya bertujuan untuk:**

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- 2) Peningkatan potensi pemuda dan olahraga.
- 3) Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
- 4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Panjang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor :061/80.a/WAKO-PP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 061/31/WAKO-PP/2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Padang Panjang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	1. Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	1. Kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks RB 3. Level Maturitas SPIP 4. Penilaian evaluasi LAKIP Kota 5. Penilaian LPPD Kota 6. Opini BPK
Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Meningkatkan Angka Melek Huruf Pada Usia 7 Tahun Ke Atas 2. Menuntaskan Program Wajar 12 Tahun	Angka Melek Huruf 1. APK SD/MI/SDLB/ Paket A 2. APM SD/MI/SDLB/ Paket A 3. APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B 4. Angka Putus Sekolah : a. SD b. SLTP

Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini	3. Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini	APK PAUD
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase Perilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih Sehat 2. Jumlah Capaian Tatanan Kota Sehat
	2. Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	1. Persentase Status Gizi Kurang
Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB
	2. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHB)
	3. Meningkatnya PDRB Sektor Tersier	Kontribusi Sektor Tersier Terhadap PDRB
	4. Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1. Angka Kemiskinan 2. Angka Pengangguran 3. Persentase PMKS Yang Tertangani
Peningkatan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Beragama dan Berbudaya	2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penerapan ABS SBK	Jumlah Zakat, Sedekah yang dikumpulkan BAZ
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1. IPG Kota Padang Panjang 2. IDG Kota Panjang
Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Untuk Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera	Menekan angka kelahiran	1. Angka kelahiran

### C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perjanjian Kinerja Perubahan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparan dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
1.	Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien	Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kriteria Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
		Indeks Reformasi Birokrasi	56
		Level Maturitas SPIP	Level 2
		Evaluasi LAKIP Kota	B
		Penilaian LPPD Kota	Sangat Tinggi
		Opini BPK	WTP
2	Meningkatkan Angka Melek Huruf pada Usia 7 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf	99,50%

3	Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun	APK SD/MI/SDLB/Paket A	108,00%
		APM SD/MI/SDLB/Paket A	95,00%
		APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B	101%.
		Angka Putus Sekolah:	
		a. SD	0,10%
		b. SLTP	0,10%
4	Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini	APK PAUD	90,00%
5	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat	Persentase Perilaku Masyarakat Untuk Hidup Bersih Sehat	75 %
		Jumlah Capaian Tatapan Kota Sehat	8 tatanan
6	Meningkatnya Status Gizi masyarakat	Persentase Status Gizi Kurang	5,00%
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB	6,80%
8	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHB)	40.062.023
9	Meningkatnya PDRB Sektor Tersier	Kontribusi Sektor Tersier Terhadap PDRB	73,26%
10	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	640 Miliar
11	Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	5,50%
		Angka Pengangguran	4,20%
		Persentase PMKS yang tertangani	5%
12	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penerapan ABS SBK	Jumlah Zakat dan Sedekah yang dikumpulkan BAZ	3,040 Miliar
13	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	IPG Kota Padang Panjang	80,00%
		IDG Kota Padang Panjang	81,00%
14	Menekan Angka Kelahiran	Angka Kelahiran	1.80 %

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta telah berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang, guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VIIc dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91	Sangat tinggi
2.	76 > 90	Tinggi
3.	66 > 75	Sedang
4.	51 > 65	Rendah
5.	50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 tahun 2010

Adapun tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintah Daerah Yang Efektif dan Efisien	1. Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (88,31)	Baik (80,9375)	91,65%
		2. Indeks Reformasi Birokrasi	56	61,57	109,94%
		3. Level Maturitas SPIP (Level 2)	Level 2	Level 2	100%
		4. Evaluasi LKjIP	B	CC	-

		5. Penilaian LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%
		6. Opini BPK	WTP	-	-
2.	Meningkatkan Angka Melek Huruf Pada Usia 7 Tahun Keatas	1. Angka melek huruf	99,50%	99,46%	99,96%
3.	Menuntaskan Program Belajar 12 Tahun	1. APK SD/MI/SDLB/ Paket A	108,00%	119,15%	110,32%
		2. APM SD/MI/SDLB/ Paket A	95,00%	105,05%	110,58%
		3. APK SMP/MTSN/S MPLB/Paket B	101%	171,47%	169,77%
		4. Angka putus sekolah			
		-SD	0,10%	0,07	142,86
		-SLTP	0,10%	0,52	19,23
4.	Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini	1. APK PAUD	90%	90,21	100,23
5.	Peningkatan PHBS	1. Persentase Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat	75%	41,85%	55,80%
		2. Capaian Tatanan Kota Sehat	8 tatanan	8 tatanan	100%
6.	Meningkatkan status gizi masyarakat	1. Persentase status gizi kurang	5%	5,50%	90,90%
7.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	1. Pertumbuhan PDRB	6,80%	5,91%	86,91%
8.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. PDRB perkapita (ADHB)	40.062.023	60.640.000	151,37%

9.	Meningkatnya PDRB sektor tersier	1. Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	73,26%	74,46%	101,47%
10.	Meningkatnya nilai investasi	1. Nilai investasi	640 milyar	811,216 milyar	126,75%
11.	Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat	1. Angka kemiskinan	5,50%	5,88%	93%
		2. Angka pengangguran	4,20%	5,19%	77%
		3. Persentase PMKS yang tertangani	5 %	4,94%	98,8%
12.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK	1. Jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan	3.040 milyar rupiah	3.080 milyar rupiah	102%
13.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1. IPG Kota Padang Panjang	80,00%	98,56%	124%
		2. IDG Kota Padang Panjang	81,00%	76,01%	94%
14.	Menekan angka kelahiran	1. Angka kelahiran	1,80	0,73	159,44%

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih terinci lagi pada matriks pengukuran kinerja dalam lampiran I.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2018 yang merupakan tahun kelima RPJMD 2013-2018, Pemerintah Kota Padang Panjang secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 14 (empat belas) sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2018 Pemerintah Kota Padang Panjang.



Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 14 (empat belas) sasaran strategis Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut:

### **SASARAN STRATEGIS 1**

#### **Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yaitu “Memantapkan Tata Cara Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN”, dan juga untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien”. Untuk mengukur sasaran strategis 1 ini terdapat 6 indikator sasaran.

**Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Strategis 1**

#### **Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**

No .	Indikator Kinerja	Tahun 2017			2018			Target akhir RPJMD (2018)
		Target	Reali sasi	% Capai an	Target	Reali sasi	% Capai an	
1	Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kriteria Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	Baik (80,3975)	Baik (80,3975)	100%	Sangat Baik (88,31)	Baik (80,3975)	91,65%	Sangat Baik (88,31)
2	Indeks Reformasi Birokrasi	54	54,94	100,17%	56	61,57	109,94%	59
3	Level Maturitas SPIP (Level 2)	-	-	-	Level 2	Level 2	100%	100%
4	Evaluasi LKjIP Kota	CC	CC	100 %	B	CC	-	B

5	Penilaian LPPD Kota	Tinggi	Tinggi	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi
6	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	-	-	WTP

*Sumber Data : Setdako, Inspektorat, BPKD, Tahun 2018 Kota Padang Panjang*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 6 indikator sasaran Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien 2 indikator sasaran melebihi target, 2 indikator sesuai target dan 2 indikator sasaran tidak mencapai target. Pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

**1. Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kriteria Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat**

Salah satu capaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Padang Panjang telah dilakukan semenjak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, pelaksanaan survey secara umum dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, namun secara khusus setiap unit pelayanan tetap melakukan survey secara mandiri dan berkelanjutan. Hasil Survey yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 memperoleh gambaran bahwa dari 24 unit layanan yang disurvei 23 unit diantaranya memperoleh nilai baik dan 1 unit memperoleh nilai kurang baik sehingga capaian tahun 2018 rata-rata mencapai nilai interval sebesar 80.9375. Nilai interval IKM sebesar 80.9375 dengan Predikat Baik (dalam interval nilai 76.66-88.30) dengan perincian nilai dan predikat mutu pelayanan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Kota Padang Panjang**

No.	Unit Pelayanan	Nilai Interval	Nilai interval konversi	Nilai interval konversi IKM	Kinerja Unit Pelayanan	Mutu pelayanan
1	Kelurahan Pasar Usang	3.42	76.61-88.30	85.5	Baik	B
2	Kelurahan Silaing Atas	3.22	76.61-88.30	80.5	Baik	B
3	Kelurahan Guguk Malintang	3.26	76.61-88.30	81.50	Baik	B
4	Kelurahan Koto Katiak	3.25	76.61-88.30	81.25	Baik	B
5	Kelurahan Tanah Pak Lambik	2.85	65.00-76.00	71.25	KurangBaik	C
6	Kelurahan Ekor Lubuk	3.17	76.61-88.30	79.25	Baik	B
7	Kelurahan Balai-Balai	3.04	76.61-88.30	76	Baik	B
8	Kelurahan Bukit Surungan	3.17	76.61-88.30	79.25	Baik	B
9	Kelurahan Silaing Bawah	3.54	76.61-88.30	88.5	Baik	B
10	Kelurahan Sigando	3.25	76.61-88.30	81.25	Baik	B
11	Kelurahan Pasar Baru	3.17	76.61-88.30	79.25	Baik	B
12	Kelurahan Ngalau	3.11	76.61-88.30	77.75	Baik	B
13	Kelurahan Koto Panjang	3.32	76.61-88.30	83	Baik	B
14	Kelurahan Kampung Manggis	3.16	76.61-88.30	79	Baik	B
15	Kelurahan Ganting	3.17	76.61-88.30	79.25	Baik	B
16	Kelurahan Tanah Hitam	3.21	76.61-88.30	80	Baik	B
17	Kelurahan Kebun Sikolos	3.17	76.61-88.30	79.25	Baik	B
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.27	76.61-88.30	81.75	Baik	B
19	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.50	76.61-88.30	87.50	Baik	B
20	UPTD Puskesmas Gunung	3.07	76.61-88.30	76.75	Baik	B
21	UPTD Puskesmas Bukit Surungan	3.25	76.61-88.30	81.25	Baik	B
22	Kecamatan Padang Panjang Timur	3.43	76.61-88.30	85.75	Baik	B
23	Kecamatan Padang Panjang Barat	3.51	76.61-88.30	87.57	Baik	B
24	Puskesmas Koto Katik	3.21	76.61-88.30	80	Baik	B
	Nilai Rata-Rata		76.61-88.30	80.9375	Baik	

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang tahun 2018, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kriteria Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Peningkatan kualitas perilaku (cakap, ramah dan baik) dan keprofesionalan aparatur pemerintah
2. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public
3. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP dan SPP

4. Pelayanan tidak berbelit-belit
5. Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.

## 2. Indeks Reformasi Birokrasi

Sebagai salah satu indikator sasaran Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan pada Tahun 2018 sebesar 56. Penilaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara mandiri melalui Aplikasi PMPRB yang sudah disediakan oleh Kemenpan-RB. Pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang meliputi dua evaluasi yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil.

Evaluasi pada manajemen perubahan yaitu :

1. Evaluasi pada peraturan perundang-undangan
2. Evaluasi pada organisasi
3. Evaluasi pada tata laksana
4. Evaluasi pada sistem sumber manajemen sumber daya manusia
5. Evaluasi pada akuntabilitas
6. Evaluasi pada pengawasan
7. Evaluasi pada kualitas pelayanan publik

Evaluasi Hasil terdapat 3 Indikator yaitu :

1. Evaluasi pada kapasitas dan akuntabilitas
2. Evaluasi pada pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
3. Evaluasi pada kualitas pelayanan publik

Dari hasil penilaian RB pada Tahun 2017 yang dilaporkan pada tahun 2018, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melampaui target yakni 61,57. Untuk penilaian Tahun 2018 dilaporkan pada Tahun 2019 masih dalam proses evaluasi

### **3. Level Maturitas SPIP**

Sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 Kota Padang Panjang menargetkan level Maturitas SPIP berada pada level 2 (berkembang). BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sejak bulan April sampai dengan Desember 2018 telah melaksanakan penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Padang Panjang dengan mengambil sampel pada 13 OPD yakni Inspektorat, BPKD, Setdako, Dinas Parawisata, Dinas PU&PR, Dinas Perkim-LH, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bappeda, DKK, BKPSDM, DPM&PTSP, DisdukCapil, dan Dinas Kominfo. Namun sampai dengan saat ini Hasil Penilaian dari BPKP Pusat atas Maturitas SPIP Kota Padang Panjang belum disampaikan.

### **4. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota.**

Hasil evaluasi LKjIP merupakan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Komponen penilaian evaluasi LKjIP meliputi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen yang digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Capaian indikator kriteria penilaian evaluasi LKjIP Kota Padang Panjang tahun ini memperoleh kategori CC berdasarkan dokumen yang dinilai adalah untuk Tahun 2017. Jika dikaitkan dengan target RPJMD masih diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras semua pihak sehingga target RPJMD 2013-2018 dapat dicapai, yaitu Kota Padang Panjang ditargetkan mendapatkan kategori B (Baik). Adapun komponen penilaian dalam evaluasi SAKIP dapat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5 : Komponen Penilaian LkjIP**

No	Indikator Yang Dinilai	Realisasi 2016		Realisasi 2017		Realisasi 2018	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	35	19.52	30	21.04	30	20.04
2	Pengukuran Kinerja	20	9.86	25	10.68	25	14.44
3	Pelaporan Kinerja	15	9.65	15	7.88	15	8.88
4	Evaluasi Internal	10	5.89	10	5.88	10	6.75
5	Capaian Kinerja	20	10.21	20	8.69	20	8.58
	Nilai Evaluasi	100	55.13	100	54.17	100	58.69
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		CC		CC

Sumber : LHE-SAKIP 2017

## 5. Penilaian LPPD Kota.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan LPPD kepada Pemerintah. LPPD digunakan sebagai dasar melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada pemerintah paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di tingkat regional (propinsi) dan di tingkat pusat. Hasil evaluasi kinerja dengan menggunakan sistem EKPPD adalah berupa indeks dengan rentang 0-4. Dimana skor  $0,00 < 1,00$  dikategorikan sebagai ‘rendah’,  $1,00 < 2,00$  dikategorikan sebagai ‘Sedang’,  $2,00 < 3,00$  dikategorikan sebagai ‘ Tinggi’,  $3,00 < 4,00$  dikategorikan sebagai ‘Sangat Tinggi’. Untuk EKPPD 2018 yang merupakan evaluasi atas LPPD TA 2017, Kota Padang Panjang mendapatkan nilai yakni 3,0142 dengan kategori tinggi dari target. Nilai EKPPD

2018, yang merupakan evaluasi atas LPPD Tahun Anggaran 2017 hasil penilaian diperoleh pada Bulan November 2018. Sedangkan untuk evaluasi LPPD Tahun Anggaran 2018 nilainya diperoleh pada tahun 2019.

## 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan Pengungkapan
3. Efektifitas sistem pengendalian intern, dan
4. Kepatuhan terhadap perundang undangan.

Untuk audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan untuk nilai audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017 yang dilakukan pada Tahun 2018 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian**. Hasil ini sesuai dengan target kinerja yang diharapkan pada target 2017. Target akhir RPJMD Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan.

Pencapaian indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan capaiannya (100%) dengan uraian sbb:

1. Penghargaan untuk Kota Padang Panjang atas laporan keuangan akhir tahun daerah Kota Padang Panjang tahun 2018
2. Penghargaan WTP
3. Buku Laporan Pronogsis Daerah Tahun 2018 tentang Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah, sebanyak 35 buku
4. Buku verifikasi Data Laporan Keuangan sebanyak 48 buku

Untuk mendapat opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Padang Panjang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Keuangan ke BPK RI harus tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan
2. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Hasil dari Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Sasaran Ini :

1. Adanya peraturan perundang undangan yang mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam hal penyusunan surat dokumen pelaporan daerah
2. Komitmen kepala daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah
3. Dukungan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan data laporan daerah.

Hambatan/ Masalah :

1. Hasil Evaluasi Laporan daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam perencanaan pembangunan ditahun berikutnya;
2. Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan pelaporan daerah sehingga dalam memproses atau menginput data terkadang masih lamban;
3. BPK dalam mengaudit keuangan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir belum dapat ditentukan hasil opini laporan keuangan;
4. Peran aktif OPD terkait dalam mewujudkan pelaksanaan SPIP dan PMPRB.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendampingan baik dalam memberikan pemahaman tentang sistem manajemen akuntabilitas kepada pimpinan OPD atau unit kerja maupun dalam penyusunan dokumen

pelaporan. Untuk penyusunan Laporan Kinerja, pendampingan dilaksanakan dengan nara sumber dari Kementerian Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sedangkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat.

## SASARAN STRATEGIS 2

### **Meningkatkan Angka Melek Huruf pada Usia 7 Tahun Keatas**

Penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*. Hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara maupun kontribusi pendidikan terhadap tujuan pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Mengingat pentingnya penuntasan buta aksara, maka Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Angka Melek Huruf pada Usia 7 Tahun Keatas dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Sasaran Strategis 2**  
**Meningkatkan Angka Melek Huruf Pada Usia 7 Tahun Keatas**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018)
	Target	Realisasi	% Capai an	Target	Realisasi	% Capai an	
Angka Melek Huruf (%)	99.46	99.46	100	99.50	99,46	99,96	99.50

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Angka Melek Huruf belum mencapai target. Capaian kinerja untuk Indikator Angka Melek Huruf Pada Usia 7 Tahun Keatas pada tahun 2018 sebesar 99,96%. Pada tahun 2018 tidak dilakukan pendataan untuk indikator ini, sehingga data yang digunakan adalah data tahun sebelumnya. Angka Melek Huruf di Kota Padang Panjang pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan angka melek huruf di Propinsi Sumatera Barat sebesar 98,93%.

Strategi untuk meningkatkan Angka Melek Huruf di Kota Padang Panjang antara lain :

1. Melaksanakan berbagai program kesetaraan paket A, B dan C.
2. Melaksanakan kegiatan literasi di tingkat kelurahan.
3. Melakukan pendataan angka melek huruf.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Angka Melek Huruf (%)**

Indikator Kinerja	Tahun 2018		
	Kota Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
Angka Melek Huruf (%)	99,46%	98,93%	95,42%

### SASARAN STRATEGIS 3

#### Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan Pembangunan Nasional. Kemajuan suatu daerah dapat dinilai dari bagaimana penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan terhadap rakyat didaerahnya yang lebih maju, tingkat pendidikannya relatif lebih baik dibanding daerah yang masih berkembang.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran terdiri dari; Indikator APK SD/MI/SDLB/Paket A menunjukkan capaian kinerja sebesar 110,32% dengan kriteria sangat tinggi ; Indikator APM SD/MI/SDLB/Paket A

menunjukkan capaian kinerja sebesar 110,58 % dengan kriteria sangat tinggi; Indikator APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B menunjukkan capaian kinerja sebesar 167,77% dengan kriteria sangat tinggi; Indikator Angka Putus Sekolah SD dengan kriteria menunjukkan capaian kinerja sebesar 142,86% dengan kriteria sangat tinggi; Indikator Angka Putus Sekolah SLTP menunjukkan capaian kinerja sebesar 19,23% dengan kriteria rendah ; Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Sasaran Strategis 3**  
**Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018) (%)
	Target	Realisa si	% Capai an	Target	Reali sasi	% Capai an	
APK SD/MI/SDLB/ Paket A (%)	119.50	117.44	98.30	108.00	119.15	110,32	120
APM SD/MI/SDLB/ Paket A (%)	109.42	120.79	110.39	95.00	105.05	110,58	110
APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	132.54	154.87	116.87	101.00	171.47	169,77	133
Angka Putus Sekolah : (%)							
SD	0.16	0.07	156.25	0.10	0.07	142,86	0.1
SLTP	0.13	0.19	53.85	0.10	0.52	19,23	0.1

Sumber Data Dinas Pendidikan Pemuda Olahrga Kota Padang Panjang Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 5 indikator sasaran menuntaskan program wajib belajar 12 tahun 4 indikator sudah melebihi target sedangkan 1 indikator belum mencapai target. Capaian kinerja untuk Indikator APK SD/MI/SDLB/Paket A pada tahun 2018 sebesar 110,32% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian

kinerja tahun 2017 sebesar 98,30%. Capaian kinerja Indikator APM SD/MI/SDLB/Paket A pada tahun 2018 sebesar 110,58% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 110,39% dan untuk capaian kinerja untuk indikator APK SMP/Mts/SMPLB/Paket B pada tahun 2018 sebesar 169,77% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 116,87%. Capaian kinerja untuk indikator angka putus sekolah SD pada tahun 2018 sebesar 142,86% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 156,25%. Capaian kinerja untuk indikator angka putus sekolah SLTP pada tahun 2018 sebesar 19,23% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 53,85%.

Faktor-faktor yang menghambat tidak tercapainya realisasi :

1. Sehubungan dengan angka putus sekolah berada pada satuan pendidikan formal, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang memberikan pendekatan persuasif kepada siswa dan orang tua yang bersangkutan untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah formal dan disamping itu diimbau kepada siswa yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan pada pendidikan non formal (Paket A dan Paket B).
2. Disamping itu penghitungan angka putus sekolah pada Dapodik, siswa yang pindah sekolah ke madrasah dikatakan sebagai putus sekolah

Strategi Pemecahan Masalah :

1. Melaksanakan berbagai program kegiatan yang menarik masyarakat yang putus sekolah untuk mengikuti Kejar Paket A setara SD dan Paket B setara SMP serta penyediaan dana bagi anak-anak rawan putus sekolah
2. Perlunya koordinasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terkait undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan pengelolaan SMA pindah ke Provinsi Sumatera Barat.

## SASARAN STRATEGIS 4

### Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan prilaku serta agama), bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Begitu pentingnya pendidikan ini. Pemerintah Kota Padang Panjang menjadikan Pembangunan Kecerdasan Anak Usia Dini menjadi sasaran Prioritas dalam RPJMD 3013-2018.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini dengan 1 indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,23% dengan kriteria sangat tinggi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9 Pencapaian Sasaran Strategis 4**

#### **Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
APK PAUD (%)	88.45	89.26	100.91	90	90,21	100,23	95

*Sumber Data: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Padang Panjang Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Membangun Kecerdasan Anak Usia Dini telah mencapai melebihi target. Capaian kinerja untuk Indikator APK PAUD pada tahun 2018 sebesar 100.23% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100,91%. Penurunan capaian kinerja pada sasaran ini disebabkan karena target 2018 lebih tinggi dari target

2017. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga jumlah peserta didik PAUD di Kota Padang Panjang adalah sebanyak 6.587 orang yang tersebar pada Kelompok Taman Kanak-Kanak sebanyak 1.122 orang, Kelompok Bermain sebanyak 918 orang, Tempat Penitipan Anak 386 orang dan Kelompok Satuan PAUD Sejenis sebanyak 4.165 orang. Sedangkan jumlah penduduk usia 0 s.d 6 tahun sebanyak 7.306 orang.

Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya target APK PAUD Tahun 2018 adalah:

- Kegiatan Sosialisasi dan Promosi PAUD oleh kader pada kegiatan Posyandu.
- Adanya persyaratan minimal jumlah anak pada lembaga PAUD Baru sebanyak 20 orang peserta didik.
- Pemberian insentif bagi Guru PAUD berdasarkan rasio anak dan guru yang telah diatur dalam Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Usia lahir < 2 tahun: rasio guru anak dan anak 1 : 4
  - b. Usia lahir 2 s.d 4 tahun: rasio guru dan anak 1 : 8
  - c. Usia lahir 4 s.d 6 tahun: rasio guru dan anak 1 : 15
- Pemberian Bantuan Operasional PAUD berdasarkan jumlah anak (Rp. 600.000,-/anak). Semakin banyak jumlah anak semakin besar BOP yang diterima lembaga PAUD. Lembaga PAUD melakukan promosi melalui radio, brosur, spanduk ataupun menyelenggarakan lomba-lomba.

## **SASARAN STRATEGIS 5**

### **Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat**

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) merupakan salah satu cara dalam mewujudkan hal tersebut. Pada Tahun 2018 PHBS telah menjadi sasaran strategis Kota Padang Panjang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran masing sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Pencapaian Sasaran Strategis 5**  
**Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase penduduk yang berprilaku hidup bersih dan sehat (%)	70%	61,64%	88%	75%	41,85	55,80	75%
Jumlah capaian tataan Kota Sehat (tataan)	8 tatanan	8 tatanan	100 %	8 tatanan	8 tatanan	100 %	8 tatanan

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018

Sasaran strategis Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat mengalami perubahan indikator dari tahun 2017. Dari tabel di atas dapat diketahui 1 indikator sasaran tidak mencapai target dan 1 indikator sasaran mencapai target.

### 1. Persentase Penduduk Yang Berprilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Indikator Perilaku Hidup Bersih Sehat pada tahun 2018 adalah 41.85% dari target 75%. Jumlah rumah tangga yang ada di Kota Padang Panjang adalah 12.403 dan jumlah rumah tangga yang dipantau sebanyak 6.877 didapatkan hasil jumlah rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar 2.878.

Untuk Cakupan Prilaku Hidup Bersih Sehat Terdapat 10 Indikator seperti terlihat pada Tabel di bawah:

**Tabel 3. 11**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran PHBS**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018
1.	Persalinan dengan Tenaga Kesehatan	100%	98,20%
2.	ASI Eksklusif	62,19%	99,52%
3.	Timbang Balita	87,34%	85,56%
4.	Menggunakan Air Bersih	92,29%	96,41%
5.	CTPS	61,84%	64,80%
6.	Jamban Sehat	72,17%	79,78%
7.	Berantas Jentik	74,20%	84,19%
8.	Makan Buah dan Sayur	53,37%	58,15%
9.	Akfifitas Fisik	66,55%	62,45%
10	Tidak merokok Dalam Rumah	45,45%	64,63%

Pencapaian indikator kinerja sasaran Cakupan Perilaku Hidup Bersih Sehat dengan uraian sebagai berikut :

1. Persalinan dengan tenaga kesehatan pada tahun 2017 mencapai 100 %. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 98% dari angka ibu melahirkan difasilitas kesehatan sebanyak 867 dibandingkan jumlah persalinan/sasaran pada tahun 2018 sebanyak 875. Hal ini disebabkan oleh adanya ibu hamil yang saat melahirkan pulang ke kampungnya dan melahirkan dengan yang bukan tenaga kesehatan. Sehingga tetap terdata melahirkan bukan dengan tenaga kesehatan.

- Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah meningkatkan upaya promotif, preventif terhadap ibu hamil untuk melahirkan pada tenaga kesehatan dan lebih mengintensifkan penyuluhan pada ibu hamil.
2. ASI Eksklusif pada tahun 2017 adalah sebesar 62.19%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 99,52%. Angka ibu yang ASI eksklusif sebanyak 414 dibandingkan dengan sasaran sebanyak 416 pada tahun 2018. Faktor pendukungnya adalah program penyuluhan ASI Eksklusif terlaksana dengan baik sehingga terjadi perubahan perilaku ibu untuk memberikan ASI saja sampai 6 bulan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang terus melakukan penyuluhan tentang ASI Eksklusif.
  3. Timbang Balita pada tahun 2017 adalah sebesaar 87.34%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 85,56%. Jumlah timbang balita pada tahun 2018 hanya sebanyak 1.861 dibandingkan jumlah sasaran sebanyak 2.175. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi orang tua untuk membawa anak balitanya ke posyandu. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adalah meningkatkan penyuluhan dan motivasi kepada ibu yang memiliki anak balita untuk dapat membawa anaknya ke posyandu serta kunjungan rumah (ketuk pintu).
  4. Menggunakan Air Bersih pada tahun 2017 adalah sebesar 92.29%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 96,41%. Rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2018 adalah sebanyak 6.174 dibandingkan jumlah sasaran yang pantau sebanyak 6.404 faktor pendukung adanya dukungan lintas sektor dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Perkim LH dan PDAM.
  5. CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) pada tahun 2017 adalah sebesar 61.84%. Pada tahun 2018 menjadi 64,80%. Jumlah individu yang melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah 13.290 dari sampel 20.510 hal ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran/prilaku untuk hidup bersih. Usaha yang terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang

Panjang adalah memberikan penyuluhan/edukasi tentang pentingnya cuci tangan sehingga menjadi kebiasaan.

6. Jamban Sehat pada tahun 2017 kinerja kegiatannya adalah sebesa 72.17% pada tahun 2018 naik menjadi 79,78%. Jumlah rumah yang menggunakan jamban sehat adalah sebanyak 5.083 di bandingkan dengan jumlah sasaran sebanyak 6.371. Hal ini disebabkan karena Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang terus melakukan upaya penyuluhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sehingga masyarakat memahami pentingnya jamban sehat dan membuat jamban sehat.
7. Berantas Jentik Pada Tahun 2017 adalah sebesar 74.20% pada Tahun 2018 naik menjadi 84.19% dari jumlah rumah yang melakukan berantas jentik sebanyak 5.790 di bandingkan sasaran sebanyak 6.877. Hal ini disebabkan keberhasilan program promosi preventif dan promotif yaitu memberikan penyuluhan bahwa pentingnya berantas jentik terutama di tempat-tempat yang bisa menampung air dimana itu merupakan tempat berkembang biaknya jentik.
8. Makan buah dan sayur pada tahun 2017 sebesar 53.37%. Pada tahun 2018 kinerja kegiatannya naik menjadi 58,15% dari jumlah individu sebanyak 11.346 dibandingkan sasaran sebanyak 19.510. Faktor pendukung adalah Program Gerakan Masyarakat (Germas) dan telah sadarnya masyarakat untuk mengkonsumsi buah dan sayur dan upaya ini akan terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
9. Aktifitas Fisik Pada tahun 2017 adalah sebsar 66.55% pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 62,45% dari jumlah individu yang melakukan aktifitas fisik sebanyak 12.595 dibandingkan jumlah sasaran sebanyak 20.169. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olah raga secara rutin dan terukur. Kedepan Dinas Kesehatan Bersama dengan OPD lain terus memotifasi dan promosi kepada seluruh masyarakat akan pentingnya olah raga/aktifitas fisik dengan cara melakukan senam bersama yang dilakukan 2

kali dalam sebulan yang dilakukan dengan OPD lain dan setiap hari minggu untuk masyarakat.

10. Tidak Merokok Dalam Rumah Pada Tahun 2017 kinerja kegiatannya adalah sebesar 45.45% pada tahun 2018 naik menjadi 64,63% dari angka individu yang tidak merokok sebanyak 7.091 dibandingkan sasaran sebanyak 10.927. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya prilaku masyarakat tentang bahaya merokok dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terus memotifasi dan promosi kepada seluruh masyarakat akan pentingnya bahaya merokok dan telah mengeluarkan Perda Kawasan Tanpa Rokok No 2 Tahun 2014 dan Perwakonya No.8 tahun 2016.

Sampel data Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga Kota Padang Panjang berdasarkan 4 unit puskesmas yaitu Puskesmas Gunung, Puskesmas Koto Katik, Puskesmas Kebun Sikolos dan Puskesmas Bukit Surungan, dari total jumlah rumah tangga di Kota Padang Panjang sebesar 12.403 dan jumlah rumah tangga yang dipantau adalah sebesar 2.995. Dari hasil pemantauan dan pendataan jumlah rumah tangga berPHBS adalah sebesar 2.878.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- a. Masih ada rumah masyarakat yang memiliki jamban yang belum memenuhi syarat.
- b. Lahan masyarakat yang terbatas untuk membuat septic tank dan sumber air bersih karena lokasi rumah berada pada tempat yang ketinggian dan belum terjangkau oleh PDAM.
- c. Air PDAM yang sering mati dan kurang bersih.
- d. Belum maksimalnya pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tertib Rokok Masih kurangnya sarana tempat merokok.

- e. Terdapat perubahan indikator perhitungan hasil akhir keluarga yang ber PHBS dimana jika salah satu dari 10 indikator maka keluarga tersebut langsung dikatakan tidak ber PHBS.
- f. Masih kurangnya pembinaan langsung ke rumah sasaran keluarga yang tidak ber PHBS terutama pada indikator CTPS. Timbang balita dan tidak merokok di dalam rumah.

Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

1. Kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Permukiman Lingkungan Hidup agar setiap pembangunan dilengkapi dengan sarana air bersih dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan.
2. Memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal di sekitar rumah masing-masing.
3. PDAM perlu menambah jaringan perpipaan dan revitalisasi pipa yang ada.
4. Memaksimalkan monitoring dan evaluasi Perda KTR Nomor 2 tahun 2018 ke seluruh OPD dengan menerapkan reward dan punishment
5. Mengintensifkan kegiatan preventif dan promotif diseluruh lingkungan masyarakat dan media promosi yang edukatif dan inovatif.
6. Penambahan jumlah Pos Bindu.
7. Lebih meningkatkan pembinaan ke sasaran rumah tangga yang terdapat dari 10 indikator yang tidak terpenuhi dengan melibatkan bidan kelurahan, kader poskeskel dan langsung di evaluasi oleh pemegang program.
8. Lebih mengintensifkan penyuluhan pada ibu dan balita di posyandu terkait CTPS persalinan nakes dan tidak merokok di rumah.

## 2. Jumlah Capaian Tatanan Kota Sehat

Pada indikator Capaian Tatanan Kota Sehat untuk Kota Padang Panjang adalah 100% dari 8 tatanan. Adapun 8 tatanan dari kota sehat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tatanan Kawasan pemukiman sarana dan prasarana sehat.



2. Tatanan Kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi.
3. Tatanan Kawasan industri dan perkotaan sehat.
4. Tatanan Kawasan pariwisata sehat.
5. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi.
6. Tatanan Kehidupan masyarakat sehat dan mandiri.
7. Tatanan Kehidupan sosial yang sehat.
8. Tatanan Hutan Sehat.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tatanan Kota Sehat adalah:

1. Kerjasama dengan lintas sector.
2. Keaktifan forum Kota sehat dalam mengumpulkan dan mempersiapkan dokumen untuk penilaian dan evaluasi tatanan kota sehat berikutnya.
3. Dinas Kesehatan sebagai Leading Sektor yang bertugas untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan lintas sektor untuk dapat menjalankan terkait urusan tatanan kota sehat.

Untuk kedepannya Dinas Kesehatan akan tetap meningkatkan kinerja melalui koordinasi lintas sektor dengan semua OPD tatanan yang terkait dengan Kota Sehat.

## SASARAN STRATEGIS 6

### Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Salah satu wujud keberhasilan bidang kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan tersebut salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya status gizi masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang selalu berupaya dalam peningkatan status gizi masyarakat dengan melaksanakan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkala. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dengan satu indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 90,90% . Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Pencapaian Sasaran Strategis 6**  
**Meningkatnya Status Gizi Masyarakat**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Status Gizi Kurang	5,16	5,76	111%	5%	5,50%	110%	5%

Realisasi Persentase Penurunan Status Gizi Kurang tahun 2017 adalah sebanyak 5.76% dari target 5.16%. Pada tahun 2018 dari target 5.00% realisasinya sebesar 5.50% dengan tingkat capaian sebesar 110%. Dari jumlah balita yang ditimbang pada tahun 2018 sebanyak 3.293 dan terdapat balita gizi kurang sebanyak 182 orang.

Faktor penghambat dalam pencapaian program dan kegiatan adalah :

1. Perilaku orang tua/pengasuh yang kurang mendukung pemberian makan balita sesuai dengan usianya (PMBA).
2. Daya beli makanan masyarakat yang masih rendah.
3. Belum optimalnya pemantauan status gizi balita.
4. Kurang Pedulinya lingkungan masyarakat terhadap status kesehatan dan gizi balita yang berada di lingkungannya.
5. Masih rendahnya kepedulian ibu balita terhadap manfaat Posyandu sebagai wadah tempat pemantauan pertumbuhan balita.
6. Kurangnya dukungan dari lintas sektor dalam peningkatan kunjungan ke Posyandu.

Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan :

1. Mengaktifkan Pokjanal posyandu mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota.
2. Mengintensifkan promosi dan penyuluhan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan secara umum.

4. Advokasi dengan Lintas Sektor untuk pembentukan pos gizi di setiap kecamatan.
5. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor untuk peningkatan monitoring dan kunjungan ke posyandu.

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Capaian Status Gizi Kurang**

Indikator Kinerja	Tahun 2018		
	Kota Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
Persentase Status Gizi Kurang (%)	5.50%	18.90%	17.7%

#### SASARAN STRATEGIS 7

##### Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan daerah. Kinerja pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dapat tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Secara teoritis pertumbuhan ekonomi berarti proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 86,91% dengan kriteria tinggi Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14 Pencapaian Sasaran Strategis 7**  
**Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018) (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Pertumbuhan PDRB (%)	6,69	5,8	86,69	6,8	5,91	86,91	6,8

*Sumber Data : BPS Kota Padang Panjang Tahun 2018*

Capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 86,91% mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 86,69%.

Berdasarkan harga konstan 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2018 diperkirakan meningkat tipis. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Selama tahun 2018 diperkirakan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,91%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,80%.

Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2018 dipercepat oleh adanya investasi dan konsumsi masyarakat. Investasi dimaksud utamanya adalah penyelesaian pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan kembali pasar, pembangunan rusunawa dan islamic center, serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memudahkan investasi. Sedangkan konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh peningkatan yang sangat signifikan pada penghasilan ASN Kota Padang Panjang. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif.

#### **Permasalahan :**

Meskipun demikian, pertumbuhan 5,91% memang masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu 6,8%. Hal ini disebabkan karena targat 2018 ditetapkan mengacu pada target RPJMD Tahun 2013-2018, dimana pada waktu penyusunan rencana tersebut di tahun 2013 perekonomian Kota Padang Panjang, Regional dan Nasional berada dalam kondisi yang sangat baik, yaitu 6,29% sehingga angka 6,8% di tahun 2018 dinilai cukup realistik mengingat banyaknya program infrastruktur dan ekonomi yang akan digulirkan. Dalam perkembangannya, perekonomian Kota Padang Panjang terimbas perlambatan perekonomian dunia yang berpengaruh pada perekonomian nasional dan regional, sehingga berturut-turut tahun 2014, 2015 dan 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan di angka 6,08%, 5,91%, dan 5,80%. Baru pada tahun 2017 perekonomian Kota Padang Panjang mengalami peningkatan pertumbuhan tipis di angka 5,81% disebabkan karena sedang berjalannya pembangunan sejumlah infrastruktur besar sebagaimana dijelaskan di awal tadi. Tren tahun 2017 tersebut diperkirakan masih akan

berlanjut di tahun 2018 karena proyek-proyek tersebut masih dalam tahap penyelesaian di tahun 2018.

**Solusi :**

Jatuhnya pertumbuhan ekonomi di angka 5,80% pada tahun 2016, maka untuk mencapai angka pertumbuhan pada angka 6,8% sesuai target RPJMD diperlukan berbagai inovasi dan upaya serta tambahan investasi yang besar agar lapangan-lapangan usaha yang mengalami perlambatan dapat mengalami lompatan pertumbuhan sesuai harapan.

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator Kinerja	Tahun 2018		
	Kota Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,91%	5,29%	5,17%

**SASARAN STRATEGIS 8**

**Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**

Untuk menggambarkan sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat” diukur dengan indikator yang sudah umum digunakan yaitu dengan melihat angka-angka produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. PDRB Perkapita sering dijadikan acuan bagi keberhasilan suatu daerah, karena secara langsung angka ini menggambarkan potret rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu daerah dalam satu tahun. Jika pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk pada tahun yang sama, maka diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pendapatan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 151,37% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut



**Tabel 3.16:Pencapaian Sasaran Strategis 8**

**Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018)
	Target	Realisasi	% Capai an	Target	Realisasi	% Capai an	
Pertumbuhan PDRB perkapita (ADHB) (Rp)	36.929.991	57.990.000	157,02	40.062.023	60.640.000 *)	151,37	40.062.023

\*) angka proyeksi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indicator sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat telah dapat tercapai melebihi target. Capaian kinerja tahun 2018 untuk indikator ini adalah sebesar 151,37%. Meskipun mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2017 yang mencapai sebesar 157,02% namun angka ini sudah melampai target yang ditetapkan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain yang paling dominan adalah karena faktor tumbuh positifnya perekonomian Kota Padang Panjang di angka 5,91% dan faktor inflasi yang terjaga rendah pada angka 2,60%. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang meningkat tipis dari tahun 2017 yang hanya 5,81 dan angka inflasi ini yang dapat ditekan lebih rendah daripada rata-rata inflasi 3 tahun terakhir. Kedua faktor ini berpengaruh positif pada peningkatan nilai PDRB perkapita sehingga jauh melampaui angka yang telah ditargetkan, yaitu di angka mencapai 151,37%.

**SASARAN STRATEGIS 9**

**Meningkatkan PDRB Sektor Tersier**

Struktur perekonomian yang mencerminkan ciri sebuah kota adalah lebih berkembangnya sektor tersier dibandingkan sektor-sektor lainnya . Sektor tersier tersebut

meliputi sektor perdagangan, Hotel dan Restoran, pengangkutan /telekomunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan , serta jasa-jasa. Sektor ini perlu didorong tanpa meninggalkan sektor-sektor lainnya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang yang pada gilirannya dapat mensejahterakan masyarakat meskipun dalam perhitungan PBRD metode baru tidak dikenal lagi terminologi kelompok sektor primer, sekunder maupun tersier, namun indikator tersebut tetap dapat diukur dengan cara menyandingkan perhitungan PDRB metode lama dan metode baru.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Tersier” dengan 1(satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 101,47% dengan kriteria sangat tinggi. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Tersier adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.17: Pencapaian Sasaran Strategis 9**  
**Meningkatnya PDRB Sektor Tersier**

Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018)
	Target	Realisa si	% Capai an	Target	Realisa si	% Capai an	
Kontribusi Sektor tersier terhadap PDRB (%)	73.26	75,6*)	103,19	73,26	74,46	101,63	73,38

Sumber: Bappelitbang Kota Padang Panjang Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Tersier Tahun 2018 mencapai 101,63%. Capaian kinerja pada Tahun 2018 sebesar 101,63% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2017 sebesar 103,19%.

Faktor yang menyebabkan tercapainya indikator ini dikarenakan terjadinya peningkatan kontribusi pada sejumlah lapangan usaha di sektor tersier yaitu lapangan usaha :

1. Transportasi dan perdagangan naik dari 13,43% menjadi 13,75%.
2. Penyediaan akomodasi dan makan minum dari 2,17% menjadi 2,25%.
3. Informasi dan komunikasi 9,77% menjadi 10,40%.

4. Jasa Pendidikan 7,53% menjadi 7,93%.
5. Jasa Kesehatan 1,34% menjadi 1,36%.

Disamping itu sejumlah lapangan usaha sektor tersier walaupun mengalami perlambatan tapi tetap memberikan kontribusi dominan yaitu lapangan usaha :

1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,42%
2. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 8,67%

#### **SASARAN STRATEGIS 10**

##### **Meningkatnya Nilai Investasi**

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal pada aktivitas tertentu yang biasanya dilakukan dalam jangka pajang atau menengah dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara atas penundaan dampak inflasi , resiko dll yang ditanggung.

Perekonomian Padang Panjang selama ini bergantung kepada investor lokal yang bergerak diberbagai bidang seperti developer rumah, ruko, hotel, restoran, perdagangan, industri, dan lain-lain. Dengan memberikan berbagai kemudahan kepada meraka diharapkan semakin banyak investor yang mau menanamkan modal di Kota Padang Panjang. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 126,75% dengan kriteria tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18: Pencapaian Sasaran Strategis 10

**Meningkatnya Nilai Investasi**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018)
	Target	Realisasi	% Capai An	Target	Realisasi	% Capai an	
Nilai Investasi (Rp)	590 milyar	716.80 milyar	121.49	640 milyar	811,216 milyar	126,75 %	640 milyar

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018 Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Nilai Investasi tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 126,75% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 121,49 %.

Faktor-faktor yang menyebabkan Meningkatnya Nilai Investasi di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Semenjak awal tahun 2017 berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menggabungkan Bidang Penanaman Modal dan Urusan Ketenagakerjaan ke Kantor Pelayanan Terpada Satu Pintu (DPMPTSP) dengan tujuan meningkatkan pelayanan perizinan modal/investasi di Kota Padang Panjang.
2. Komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap peningkatan nilai investasi yang sangat tinggi, salah satu buktinya dengan tersusunnya Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Padang Panjang hingga tahun 2025 di tahun 2017. Tujuan RUPM ini adalah menyediakan dokumen yang berisikan arahan dan strategi penanaman modal yang dapat dijadikan pedoman perencanaan di dalam peningkatan investasi yang lebih terarah dan terpadu dengan pemanfaatan yang ada di Kota Padang Panjang hingga tahun 2025 dengan maksud agar pihak-pihak

yang terkait dapat saling mengerti dan memahami serta saling mendukung terciptanya kondisi penanaman modal/investasi yang kondusif,promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan serta efisien dan efektif sehingga mampu menata dan meningkatkan investasi yang lebih besar untuk mendukung percepatan pembangunan.

3. Sampai pertengahan tahun 2018 izin prinsip penanaman modal dengan modal diatas Rp 500.000.000,- dientrikan melalui Aplikasi SPIPISE berdasarkan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pengendalian penanaman modal, namun setelah berlakunya Perda Nomor 17 tahun 2018 maka jumlah nilai investasi yang dienterikan tidak hanya yang bernilai di atas Rp 500.000.000,- , namun seluruh investasi yang dipandang mungkin untuk berkembang. Selain itu dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (OSS). Yang mana seluruh pelaku usaha yang mengurus perizinan berusaha terintegrasi dalam satu aplikasi pendaftaran. Sehingga data jumlah investasi setiap perusahaan tercantum dalam aplikasi OSS ini.
4. Dalam rangka meningkatkan Perekonomian Daerah serta mendukung Perekonomian Nasional, kota Padang Panjang melakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha di Kota Padang Panjang, dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kota Padang Panjang yang bertugas melakukan pengawalan, pemantauan dan penyelesaian permasalahan perizinan, dan meningkatnya pelayanan seluruh perizinan berusaha.

## SASARAN STRATEGIS 11

### **Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Perbaikan tingkat kesejahteraan Masyarakat merupakan salah satu sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun



2013-2018. Tantangan terbesar untuk mewujudkan hal tersebut adalah penurunan angkakemiskinan dan pengangguran dimana angka ini juga berbanding lurus dengan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terlaksananya Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran terdiri dari; Indikator Penurunan Angka Kemiskinan menunjukkan capaian kinerja sebesar 93,09%; Indikator Penurunan Angka Pengangguran menunjukkan capaian kinerja sebesar 77 %; Indikator Persentase Penurunan PMKS menunjukkan capaian kinerja sebesar 98,8 %.Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Sasaran Tabel 3.19.Pencapaian Strategis 11**

**Perbaikan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Angka Kemiskinan (%)	5,70	6,17	91.75	5,50	5.88	93.09	5.50
Angka Pengangguran (%)	4.20*)	5,43*)	70.45	4,20	5,19%	77%	4.2
Persentase PMKS yang Tertangani(%)	4.8	2.94	138.75	5%	4,94%	98,8%	5

*Sumber : Bappelitbang, Bagian Perekonomian Setdako, Dinas Sosial PPKBPPP Kota Padang Panjang Tahun 2018*

*\*) Angka Koreksi*

**1. Angka Kemiskinan**

Capaian untuk indikator angka kemiskinan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 93,09% dibanding dengan tahun 2017 sebesar 91,75%

Secara umum kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut

- Adanya pendataan dan pemetaan kemiskinan sebagai basis data dan informasi untuk penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- Mengintegrasikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara keseluruan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Sinkronisasi dan sinergi antara intervensi pusat dan intervensi daerah dan antara berbagai intervensi daerah (antar OPD) ke dalam proses perencanaan reguler di daerah melalui mekanisme musrenbang.
- Mengoptimalkan peran TKPKD dalam mengawal dan memastikan terlaksananya sinkronisasi dan sinergi berbagai intervensi (strategi, kebijakan, program dan kegiatan) serta aliansi kerjasama dan kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat).
- Pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang kontinu oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta kinerja pencapaian target program dan kegiatan
- Koordinasi dan konsultasi yang intensif antara TKPKD Kabupaten dan Kota dan TKPKD Provinsi, Bappenas dan TNP2K dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.
- Dukungan regulasi yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan kebijakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan dalam dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan antara lain :

- Program penanggulangan kemiskinan antar OPD belum terintegrasi dan masih tumpang tindih.
- Ego sektoral antar OPD masih besar dalam menjalankan programnya sendiri sehingga TKPK mengalami kesulitan dalam mengevaluasi pencapaian penanggulangan kemiskinan secara akurat dan tepat.
- Pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tidak memuat program penanggulangan kemiskinan sehingga pemerintah daerah sulit untuk menentukan kriteria yang menjadi program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud.
- Program dan kegiatan yang dilakukan kurang menyentuh sasaran.

- Program dan kegiatan yang dilakukan cenderung berulang setiap tahun sehingga menjadi kegiatan yang bersifat rutin.
- Sebagian besar program dan kegiatan bersifat bantuan langsung sehingga tidak mengarah kepada proses kemandirian.
- Penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada kondisi dan indikator makro, sementara belum tentu masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
- Belum ada instrumen upaya penanggulangan kemiskinan yang spesifik sesuai dengan keragaman dan dimensi permasalahan di daerah.
- Dukungan pendanaan operasional terhadap KK miskin setiap tahunnya sehingga tidak didapat data jumlah penduduk miskin dan siapa saja yang sudah terentaskan tiap tahunnya.
- Belum adanya evaluasi terhadap KK miskin setiap tahunnya sehingga tidak di dapat data jumlah penduduk miskin dan siapa saja yang sudah terentaskan tiap tahunnya.
- Belum seluruh anggota TKPKD terlibat secara aktif dalam TKPKD Kota Padang Panjang.
- Pendanaan yang dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan yaitu pendanaan perbankan untuk modal usaha masih sulit untuk diakses dan dimanfaatkan.

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan**

Indikator	Tahun 2018			
	Kinerja	Kota Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
Angka Kemiskinan (%)	5,88%	6,87%	9,82%	

## 2. Angka pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk melihat tingkat penyerapan tenaga kerja yang tersedia. Secara lebih terperinci pengangguran terbuka

didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Jika TPT kurang dari 4 persen maka berarti tingkat pengangguran suatu daerah masih dianggap normal. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja merupakan indikator keterjangkauan lapangan kerja sehingga berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Hal ini bisa juga dijadikan sebagai indikator keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Capaian kinerja untuk indikator Angka Pengangguran pada tahun 2018 sebesar 77%, jika dibandingkan dengan tahun 2017 juga sebesar 70,45 % tetapi dengan target dan realisasi yang berbeda

Faktor yang mempengaruhi masih belum tercapainya target penurunan angka pengangguran dikarenakan sempitnya peluang kerja dalam sektor formal di Kota Padang Panjang dan tingkat keterampilan tenaga kerja masyarakat Kota Padang Panjang yang masih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja bersal diluar kota padang Panjang.

**Tabel 3. 21**  
**Perbandingan Capaian Angka Pengangguran**

Indikator Kinerja	Tahun 2018		
	Kota Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
Angka Pengangguran (%)	5,19%	5,5%	5,34%

### 3. Persentase PMKS yang tertangani

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penurunan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ) pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 98,8% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 58,8%

Faktor-faktor yang mempengaruhi masih belum tercapainya target adalah sikap mental masyarakat yang tidak mau keluar dari data kemiskinan.

## SASARAN STRATEGIS 12

### **Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan penerapan ABS SBK**

Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Khitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat Minang Kabau mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya (adat) dengan norma-norma agama islam. Artinya nilai-nilai agama Islam dijadikan dasar oleh masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai sosial budaya dan terus dan terus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan masyarakat. Di Kota Padang Panjang yang dijuluki kota *SERAMBI MEKKAH*, pola kehidupan tersebut telah menjadi perhatian bagi masyarakat salah satu contoh, masalah kemiskinan di Kota Padang Panjang tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang Panjang, akan tetapi masyarakat juga turut bertanggung jawab. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penerapan ABS SBK dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 101.33 % dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22 Pencapaian Sasaran Strategis 12  
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penerapan ABS SBK**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018) (Rp)
	Target	Realisasi	% Capai an	Target	Realisasi	% Capai an	
Jumlah zakat, sadakah yang dikumpulkan BAZ (Rp)	Rp. 3 Milyar	Rp. 3.086.467.261	102.88	Rp. 3.040 Milyar	Rp. 3.080.722.627,-	101,33%	3,Milyar

*Sumber Data: Bagian Kesra Setdako Tahun 2018 Kota Padang Panjang*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator Meningkatnya jumlah zakat, sedekah yang dikumpulkan BAZ Tahun 2018 telah mencapai melebihi target.

Faktor yang mempengaruhi capaian realisasi jumlah zakat,sadakah yang dikumpulkan:

1. Di Kota Padang Panjang yang dijuluki kota *SERAMBI MEKKAH*, pola kehidupan tersebut telah menjadi perhatian bagi masyarakat salah satu contoh, masalah kemiskinan di Kota Padang Panjang tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang Panjang, akan tetapi masyarakat juga turut bertanggung jawab. Ini dapat kita lihat dari kepedulian seluruh lapisan masyarakat dalam membayar zakat dan sedekah yang dikoordinir melalui BAZ Kota Padang Panjang.
2. Dari capaian realisasi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Padang Panjang telah terbantu sekian banyak Masyarakat fakir dan miskin yang masuk kategori yang berhak menerima zakat sesuai dengan program kerja BAZNAS Kota Padang PADANG Tahun 2018.
3. Penyaluran dana zakat selama tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :
  - a. Program Padang Panjang Makmur (Bantuan Usaha) sebesar Rp.1.310.625.000,- bagi 541orang warga Padang Panjang
  - b. Program Padang Panjang Cerdas ( Pendidikan) sebesar Rp. Rp.935.000.000,- bagi 597 orang pelajar dan mahasiswa asal Padang Panjang.
  - c. Program Padang Panjang Sehat (Pengobatan) sebesar Rp. 126.000,- bagi 69 orang.
  - d. Program Padang Panjang Peduli (Bantuan untuk biaya konsumsi lansia BAZ) sebesar Rp. 894.100.000,- bagi 2.456 lansia.
  - e. Infak dan sedekah sebesar Rp. 25.280.130,-

### **SASARAN STRATEGIS 13**

#### **Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan**

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan demi

terwujudnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenram dan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan pemberdayaan perempuan. Peningkatan pemberdayaan perempuan ini dapat dilihat antara lain dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang mencerminkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memproleh akses, kesempatan berpartisipasi dan control atas pembangunan serta memproleh manfaat yang setara dan adil dari perempuan . sementara itu pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran belum terealisasi.

**Tabel 3.23 : Pencapaian Sasaran Strategis 13  
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018)
	Target	Realisasi	% Capai an	Target	Realisasi	% Capai an	
IPG Kota Padang Panjang	79.55	79.55*)	100%	80%	98,56%	124%	80
IDG Kota Padang Panjang	79.55	79.55*)	100%	81%	76,01%	94%	81

\*\*)angka proyeksi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 1 indikator melebihi target 1 indikator tidak mencapai target. Capaian kinerja untuk indikator IPG Kota Padang Panjang sebesar 124% pada tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% dan

capaian kerja untuk indicator IDG Kota Padang Panjang sebesar 94% pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100%.

Faktor yang mempengaruhi penurunan IDG :

1. Sumbangan pendapatan perempuan cenderung statis, tidak ada penurunan dan peningkatan
2. Persentase perempuan sebagai tenaga, mager, profesional, administrasi dan teknis cenderung mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 52,90% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 51,04%

**Tabel 3. 24**  
**Perbandingan Capaian Indeks Development Gender**

Indikator	Tahun 2018		
	Kota Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
IDG (%)	76.01%	65.01%	71.74%

**Tabel 3 .25**  
**Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender**

Indikator	Tahun 2018		
	Kota Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
IPG(%)	98,56%	94,16%	90,96%

#### **SASARAN STRATEGIS 14** **Menekan Angka Kelahiran**

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,9 juta jiwa dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,49 per tahun. Jika pertumbuhan penduduk tetap 1,49% maka secara kuantitas penduduk Indonesia tumbuh 3,5 – 4 per tahun. Kondisi tersebut membawa dampak dan pengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan nasional. Disatu sisi jumlah anak banyak akan menurunkan kemampuan investasi sumber daya manusia (SDM) dalam keluarga.

Menyadari hal itu Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan sasaran Menekan Angka Kelahiran dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 . Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menekan Angka Kelahiran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, menunjukkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 159,44% dengan kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.26: Pencapaian Sasaran Strategis 14  
Menekan Angka Kelahiran**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir RPJMD (2018) (%)
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
Angka Kelahiran (%)	20,77	20,77	100	1,80	0,73	159,44%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2018

Angka Kelahiran adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Untuk Kota Padang Panjang angka kelahiran tahun 2018 adalah sebanyak 20 kelahiran per 1000 penduduk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Menurunnya Angka Kelahiran di Kota Padang Panjang adalah :

1. Keberhasilan program kesehatan calon pengantin (catin) yaitu dengan memberikan pemahaman, pengetahuan dan sikap tentang hak-hak produksi serta perencanaan kehamilan
2. Upaya pemberian informasi yang lebih luas pada masyarakat tentang pemakaian kontrasepsi sehingga berhasilnya program KB
3. Menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja termasuk komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 14 Sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3. 27**  
**Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
		Pagu/Target	Realisasi	%Realisasi
Meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien	- Penataan kelembagaan dan penataan ketatalaksanaan	105.955.000,00	73.266.070,00	69,15%
	- Peningkatan kualitas pelayanan publik	65.325.000,00	62.478.877,00	95,64%
	- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	751.172.000,00	416.818.000,00	55,49%
	- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	94.362.500,00	76.633.230,00	81,21%
	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	199.429.500,00	129.677.740,00	65,02%
	- Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.084.430.000,00	1.577.281.183,00	75,67%
Meningkatkan angka melek huruf usia 7 tahun keatas2	- Pendidikan Non Formal	697.954.000,00	466.278.000,00	66,81%
Menuntaskan program belajar 12 tahun	- Wajib belajar pendidikan dasar	10.877.171.154,00	9.882.436.405,00	90,85%
	- Manjemen Pelayanan Pendidikan	1.382.070.000,00	943.330.030,00	68,25%
	- Bantuan Operasional Sekolah	8.354.157.803,00	7.848.218.925,00	93,94%

	- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (3)	3.133.740.200,00	2.266.741.122,00	72,33%
Membangun kecerdasan anak usia dini	- Pendidikan anak usia dini	4.773.510.900,00	4.305.465.900,00	89,80%
Peningkatan PHBS 5	- Upaya kesehatan masyarakat	11.576.535.177,00	8.325.504.974,00	71,92%
	- Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	301.160.000,00	229.627.900,00	76,25%
	- Pengembangan lingkungan sehat	361.258.000,00	342.231.332,00	94,73%
	- Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular	142.042.000,00	126.780.775,00	89,26%
	- Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	262.500.000,00	259.350.000,00	98,80%
Meningkatnya status gizi masyarakat	- Perbaikan gizi masyarakat	73.382.0 00,00	60.588.450,00	82,57%
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	- Perencanaan Pembangunan Daerah7	1.033.936.000,00	830.193.665,00	80,29%
Meningkatnya pendapatan masyarakat	- Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif8	200.350.000,00	158.757.600,00	79,24%
Meningkatnya PDRB Sektor Tersier	- Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	827.767.000,00	696.133.962,00	84,10%
Meningkatnya nilai Investasi	- Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 10	416.575.000,00	283.268.499,00	68,00%
Perbaikan Tingkat Kesejahteraan masyarakat	- Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	501.306.000,00	450.322.634,00	89,83%
	- Pembinaan Anak Terlantar	28.625.000,00	12.752.000,00	44,55%
	- Pembinaan Penyandangan Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoa dan Penyakit Sosial Lainnya)	121.410.000,00	95.882.646,00	78,97%
	- Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	237.482.500,00	191.952.050,00	80,83%
	- Peningkatan Kesempatan Kerja	58.009.000,00	51.630.500,00	89,00%
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Penerapan ABS SBK				

Meningkat Pemberdayaan Perempuan	- Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	196.175.000,00	193.876.612,00	98,83%
	- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	449.303.500,00	435.522.850,00	96,93%
Menekan Kelaharan Angka	- Keluarga Berencana	2.747.747.500,00	2.690.575.515,00	97,92%
	- Kesehatan Reproduksi Remaja	477.040.000,00	468.284.200,00	98,16%
	- Pelayanan Kontrasepsi	81.950.000,00	61.213.625,00	74,70%

### Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

LKjIP Kota Padang Panjang berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Mengupayakan peningkatan kunjungan wisatawan
4. Mengupayakan peningkatan waktu rata-rata lama menginap wisatawan
5. Penerapan inovasi teknologi produksi serta memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha
6. Optimalisasi kelembagaan UMKM

7. Mendorong berkembangnya sektor UMKM
8. Penegasan batas kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi industri
9. Menyesuaikan dokumen perencanaan jangka panjang dan tata ruang wilayah
10. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor
11. Peningkatan kualitas produk, kemasan dan jaringan pemasaran IKM
12. Meningkatkan peran lembaga penyaluran dana bergulir
13. Mendorong UMKM dan Koperasi mengakses modal dari lembaga penyaluran dana bergulir
14. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
15. Menumbuhkan koperasi-koperasi yang beranggotakan pelaku usaha sejenis (sektor riil)
16. Mengoptimalkan kinerja koperasi
17. Sinergitas sektor hulu dan hilir industri kulit
18. Membangun kawasan strategis pariwisata yang didukung oleh stakeholder terkait dengan berbasis pada wisata alam, budaya lokal, kuliner dan produk unggulan daerah
19. Mengoptimalkan pengelolaan PIHP
20. Penataan kawasan perdagangan Bukit Surungan yang dititikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung
21. Penataan kawasan pasar pusat
22. Mengoptimalkan kinerja pengawasan
23. Pembentukan UPTD kemetrologian
24. Mensinergikan pengembangan sektor pertanian, perternakan dan perikanan dalam satu kawasan

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut diatas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 diarahkan dalam yaitu :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat

2. Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW
3. Optimalisasi pemasaran pariwisata
4. Membenahi objek wisata yang telah ada dan mengembangkan objek wisata baru
5. Intensifikasi pertanian
6. Peningkatan kelembagaan UMKM
7. Fasilitasi pelaku UMKM sesuai bidang usaha
8. Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Propinsi dan Pusat terkait pengembangan industri kapur
9. Melaksanakan revisi RPJP dan RTRW
10. Menyusun Perda tentang investasi
11. Meningkatkan sarana prasarana produksi IKM unggulan
12. Meningkatkan motivasi pelaku IKM unggulan
13. Mengembangkan desain kemasan untuk berbagai produk kemasan
14. Mengembangkan model-model promosi dan mengoptimalkan kerjasama pemasaran
15. Mengembangkan pola kemitraan antar pelaku usaha
16. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
17. Penambahan modal BLUD UPTD pengelolaan dana bergulir
18. Mendorong kelompok UMKM untuk mendirikan koperasi
19. Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang telah terbentuk
20. Mendorong penerapan pola syariah dalam koperasi
21. Optimalisasi UPTD Pengolahan Kulit
22. Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit
23. Mengintensifkan promosi dan pemasaran produk kulit
24. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan kepariwisataan
25. Memberikan insentif investasi sesuai kewenangan daerah
26. Meningkatkan peran serta dan fungsi stakeholder dalam pengelolaan PIHP

27. Mengoptimalkan fungsi terminal, memperlancar arus lalulintas orang dan barang
28. Menyediakan sarana prasarana pendukung kawasan perdagangan
29. Revitalisasi pasar pusat
30. Penyempurnaan aturan dan sistem pengelolaan pasar
31. Konsistensi penerapan regulasi perlindungan konsumen
32. Penyusunan regulasi mengenai pembentukan UPTD Kmetrologian
33. Menyediakan sarana prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 688.509.379.803,00** dengan rincian sebagai berikut:

➤ **Pendapatan :**

Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp.627.739.222.000,00 setelah perubahan sebesar Rp.627.835.222.000,00.  
(bertambah Rp. 96.000.000,00).

➤ **Belanja :**

Belanja sebelum perubahan sebesar Rp.687.539.222.000,00 setelah perubahan menjadi Rp. 688.509.379.803,00.  
(*bertambah Rp. 970.157.803,00*).

➤ **Pembayaran :**

a. **Penerimaan**

Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp. 59.800.000.000,00 setelah perubahan sebesar Rp. 60.674.157.803,00  
(*bertambah Rp. 874.157.803,00*).

b. **Pengeluaran**

Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp. 0,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.0,00

## Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu :

- a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- b. Percepatan infrastruktur pendukung aktifitas ekonomi masyarakat;
- c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah;
- d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga;
- e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kota Padang Panjang lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokan kedalam **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah** yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 28**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018**  
**Per 31 Desember 2018**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
<b>Pendapatan :</b>	<b>573.797.764.727,68</b>	<b>553.777.691.146,53</b>	<b>96,51</b>
a.Pendapatan Asli Daerah	84.612.013.880,68	79.752.372.829,53	94,26
Pendapatan pajak daerah	8.078.000.000,00	8.293.992.612,00	102,67
Pendapatan retribusi daerah	5.103.577.000,00	5.158.999.649,90	101,09
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.795.081.205,00	5.795.081.205,00	100
Lain-lain PAD yang sah	65.635.355.675,68	60.504.299.362,63	92,18
b.Dana Perimbangan	459.540.835.517,00	442.112.700.653,00	97,27
Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	11.542.013.517,00	9.251.497.286,00	80,15
Dana alokasi umum	375.436.356.000,00	375.436.356.000,00	100
Dana alokasi khusus	67.562.466.000,00	57.424.847.367,00	85,00
c.Lain-lain pendapatan yang sah	34.644.915.330,00	31.912.617.664,00	92,11
Pendapatan Hibah	7.480.000.000,00	7.440.120.000,00	99,47
Dana bagi hasil pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.164.915.330,00	20.472.497.664,00	106,82
Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.000.000.000,00	4.000.000.000,00	50,00

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

## Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja di upayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja daerah dikelompokan kedalam **Belanja Operasi**, **Belanja Modal**, **Belanja Tidak Terduga** dan **Transfer** masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 3. 29**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018**  
**Per 31 Desember 2018**

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Belanja Daerah :</b>	<b>702.403.779.615,75</b>	<b>613.485.173.923,00</b>	<b>87,34</b>
a.Belanja Tidak Langsung	258.470.750.453,22	263.852.694.500,00	92,43
Belanja Pegawai	263.493.335.847,22	245.553.169.225,00	93,19
Belanja Hibah	19.764.549.300,00	17.422.626.746,00	88,15
Belanja Bantuan Sosial	659.754.000,00	373.734.2500,00	56,65
Belanja Bantuan Keuangan/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Polotik	553.111.306,00	503.164.249,00	90,97
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00		
<b>b.Belanja Langsung</b>	<b>416.933.029.162,53</b>	<b>349.632.479.423,00</b>	<b>83,86</b>
Belanja Pegawai	4.673.920.750,00	3.141.510.726,00	67,21
Belanja Barang dan Jasa	264.738.707.956,10	221.464.655.661,79	83,65
Belanja Modal	147.520.400.453,43	125.026.313.035,21	84,75

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

#### Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan probabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan daerah dikelompokan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 30**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018**  
**Per 31 Desember 2018**

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
<b>Pembiayaan :</b>	<b>128.606.014.888,07</b>	<b>128.606.014.888,07</b>	<b>100</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>128.606.014.888,07</b>	<b>128.606.014.888,07</b>	<b>100</b>
<b>Penggunaan SILPA</b>	<b>128.606.014.888,07</b>	<b>128.606.014.888,07</b>	<b>100</b>
<b>Pelampauan Penggunaan PAD</b>	<b>894.105.539,67</b>	<b>-</b>	
<b>Pelampauan dana perimbangan</b>	<b>(20.088.795.791,00)</b>	<b>0</b>	
<b>Pelampauan penerimaan lain-lain PAD yang sah</b>	<b>261.518.924</b>	<b>0</b>	
<b>Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya</b>	<b>139.152.690.771,40</b>	<b>0</b>	
<b>Sisa lebih penhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya</b>	<b>0</b>	<b>128.606.014.888,07</b>	

Jumlah Penerimaan Pembiayaan	128.606.014.888,07	128.606.014.888,07	100
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
Pembiayaan Neto	128.606.014.888,07	128.606.014.888,07	100
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)	-	68.903.192.186,60	0,00

*Sumber : BPKD Kota Padang Panjang*

# PENUTUP

## KESIMPULAN

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2018 kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban Akuntabilitas Pemerintah Daerah sekaligus dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain pencapaian tahun pelaporan 2018, juga disajikan pencapaian tahun sebelumnya dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum dari 14 indikator nampak bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 telah berhasil mencapai kinerja sasaran, yang dapat dilihat 14 indikator masuk kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Satu indikator PMPRB dan SPIP tidak dapat dilakukan pengukuran karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan dua indicator lain tidak dapat dipersentasekan karena bersifat kualitatif dan hanya satu indikator yang masuk kriteria sangat rendah.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang untuk memastikan Pencapaian Kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja Tahunan dan juga

menengah sebagai bagian dari Kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi Perbaikan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang ke depan. Pertama, walaupun beberapa indikator telah mencapai target, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa di jawab dengan baik pula. Peran pemerintah Kota Padang Panjang sangat diperlukan untuk memastikan pelayan publik secara maksimal dapat terlaksana di Kota Padang Panjang dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan sehingga tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah Kota Padang Panjang dapat meningkat.

Kedua hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah Kota Padang Panjang dengan berbagai unsur di wilayah Kota Padang Panjang. Daerah yang berbatasan dengan Kota Padang Panjang maupun juga dengan pihak-pihak diluar pemerintah. Beberapa indikator seperti peningkatan pendapatan dan penurunan angka pengangguran menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergis yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan laporan kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting di pergunakan oleh instansi dilingkungan pemerintah Kota Padang Panjang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika

hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan laporan kinerja benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

**Tabel Efisiensi Capaian Kinerja 2018**  
**Pemerintah Kota Padang Panjang**

Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja (>100%)	%Penyerapan Anggaran	Efisiensi
Meningkatkan tata laksana pengelolaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	101%	55,49%	45,51%
Menuntaskan program belajar 12 tahun	APK SD/MI/SDLB/Paket A	108%	90,86%	17,14%
	APM SD/MI/SDLB/Paket A	110,58%	68,25%	42,33%
	APK SMP/MTSN/SMPLB/Paket B	169,77%	66,45%	103,32%
	Angka putus sekolah SD	142,86	72,44%	70,42%
Membangun kecerdasan anak usia dini	APK PAUD	100,23	89,80%	10,43%
Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB perkapita (ADHB)	151,37%	79,24%	72,13%
Meningkatnya PDRB sektor tersier	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	101,47%	84,10%	17,37%
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	126,75%	68,00%	58,75%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	IPG Kota Padang Panjang	124%	98,83%	25,17%

W  
E  
B  
R  
A  
V  
E

**RAW PIRATE**

# **PRESTASI PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

## **TAHUN 2018**

### **I. TINGKAT NASIONAL**

1. Kota Padang Panjang berhasil meraih penghargaan Kota Adipura berupa "Adipura" Tahun 2018 yang diterima pada awal Tahun 2019.
2. Kota Padang Panjang berhasil meraih penghargaan "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" Tahun Anggaran 2017 dari BPK RI yang merupakan opini tertinggi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. UHC AWARD(Universal Health Coverage) adalah Penghargaan dari Presiden RI bagi Kabupaten/Kota yang telah mengasuransikan masyarakat diatas 90% dari jumlah keseluruhan Masyarakat.
4. Pastika Awya Pariwara adalah Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota yangtelah memiliki kebijakan atau peraturan tentang larangan iklan rokok diluar gedung dan telah diimplementasikannya.
5. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan bagi Kabupaten/Kota yang Puskesmasnya telah terakreditasi 100%.
- ✓ 6. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018 Kategori Madya oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- ✓ 7. Penghargaan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018.

- ✓ 8. Penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018.
- ✓ 9. Penghargaan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2018
- 10. Kota Padang Panjang terpilih menjadi salah satu dari 50 Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project dalam Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, dan Bappenas
- 11. Kota Padang Panjang terpilih menjadi Juara I pada Kategori Kota Kecil dalam ajang Indeks Kota Cerdas Indonesia 2018 yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas Group Media
- 12. Terbentuknya UPTD Kemetrologin Legal yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan dan UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan Perwako No, 41 Tahun 2017
- 13. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang memperoleh Penilaian Evaluasi Akreditasi dengan kelulusan Paripurna.
- ✓ 14. Apresiasi Pembinaan Proklim oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan Kepada Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah aktif melaksanakan Program Kampung Iklim di Daerah
- ✓ 15. Sertifikat diberikan kepada Kelurahan Ganting dan Kelurahan Koto Panjang, Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat sebagai Kategori Program Kampung Iklim Utama oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- ✓16. Juara 2 atas nama Suci Wulandari dalam kegiatan PORNAS VIII Soina 2018  
(cabang lari putri) utusan dari Kota Padang Panjang

## II. TINGKAT PROVINSI

1. Penghargaan GSB (Gerakan Sumbar Bersih) untuk Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2018
- ✓ 2. Juara I Stand Terbaik Pameran Ketahanan Pangan dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke 38 Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 di Dharmasraya.
- ✓ 3. Juara I Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Propinsi Sumatera Barat.
4. Peringkat Pertama Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK RI.
- ✓ 5. Akreditasi B UPTD PKB yang merupakan prestasi bernilai strategis pada Dinas Perhubungan dalam mempertahankan kelas uji kendaraan bermotor di Wilayah Sumatera Barat.
6. Pemeran wanita terbaik I atas nama Sandra Devi, pada Pemilihan Media Tradisional Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang
- ✓ 7. Piagam Penghargaan kepada Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang sebagai Dinas dengan Konsistensi Terbaik pada Penilaian Inovasi Pelayanan dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat Tahun 2018 oleh Gubernur Sumatera Barat
- ✓ 8. Harapan 2 Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 kepada Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang oleh Gubernur Sumatera Barat
9. Juara 1 atas nama Lenni Ekawaty, S.Pd dalam kegiatan Lomba Olimpiade Guru Pendidikan Dasar utusan Kota Padang Panjang

- ✓ 10. Juara 1 atas nama Dhea Ananda Putri dalam kegiatan O2SN Lompat Katak utusan Kota Padang Panjang
- ✓ 11. Juara 1 atas nama Doni Armanda dalam kegiatan Lomba Literasi PK-LK (Menyarikan Buku SMPLB) utusan Kota Padang Panjang
- ✓ 12. Juara 1 atas nama Suci Wulandari dalam kegiatan Kejurda Special Olympic Indonesia VIII se-Sumatera Barat 2018 (Cabang Lari Putri) utusan Kota Padang Panjang
- ✓ 13. Juara 1 atas nama Muhammad Kemal Farizky dalam kegiatan O2SN Cabang Atlentik utusan Kota Padang Panjang
- 14. Juara Provinsi atas nama Franciscus Asisi Andika D dalam kegiatan Kuis Ki Hajar Nasional 2018 utusan Kota Padang Panjang
- ✓ 15. Juara Provinsi atas nama Ridhaka Gina Amalia dalam kegiatan Lomba Menulis Essay utusan Kota Padang Panjang
- 16. Juara 1 bagi Kelurahan Ekor Lubuk dalam kegiatan KKG PKK KB Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat
- 17. Duta Anak Kota Padang Panjang mewakili perwakilan Anak Provinsi Sumatera Barat pada Kongres Anak Nasional an. Ahliya Nazra di Surabaya
- 18. Delegasi Anak Kota Padang Panjang mewakili perwakilan Anak Provinsi Sumatera Barat pada Kongres Anak Indonesia di Belitung An. Cathlin Cordelia
- 19. Juara I Lomba LBS
- 20. Juara I Lomba KKG PKK KB KES an. Kelurahan Ekor Lubuk
- 21. Juara I Lomba Kader BKL an. Neli Gustini BKL Kelurahan Pasar Usang
- 22. Juara I Lomba Dasawisma



# ADIPURA

Penghargaan Presiden Republik Indonesia

UNTUK

Kategori Kota Kecil

**KOTA PADANG PANJANG**

- 18 -

# Komisi Akreditasi Rumah Sakit



## SERTIFIKAT AKREDITASI RUMAH SAKIT

Nomor : KARS-SERT/NT/2/X/2017

Sertifikat ini dibentarkan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan

### LULUS TINGKAT:

**PARI PURNA**  
★★★  
★

Kepada :

**RSUD KOTA PADANG PANJANG**  
Jl. Tabek Gadang Kel. Ganting Kota Padang Panjang  
Provinsi Sumatera Barat

sempat dengan 17 Mei 2026

Berlaku

Jakarta,  
27 Oktober 2017  
**KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT**  
Ketua Eksekutif

Dr. dr. Sulisto, M.Kes



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM PENGHARGAAN

PASTIKA AWYA PARIWARA

dianugerahkan kepada

## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Yang telah menetapkan dan mengimplementasikan Kebijakan/Peraturan Daerah Tentang  
Pelarangan Iklan Rokok Di Luar Ruang



MENTERI KESATUAN  
NEGARA DAN  
PENGARAPAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PLACAM PENGHARGAAN

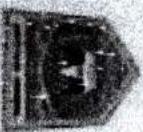
PASTIKA PARAHUA  
diareguk oleh  
kota kepada

# PEMERINTAH KOTA PADAMIC PANJANG

Yang telah menerapkan dan mengimplementasikan program  
Tanda Rahmat Kehormatan dan terkait pengembangan kota  
padamic panjang

JAKARTA, 12 JULI 2017  
MENTERI KESATUAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. dr. Nille Wardy Noercock, Sp.M(K)



BPJS Kesehatan  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

# Program Penghargaan

Dewan Perwakilan Rakyat

## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Yang Telah Mencapai UHC (Universal Health Coverage)  
Program Jaminan Kesehatan Nasional  
Kartu Indonesia Sehat (KIS)  
Tahun 2018

Pembangunan : 1 - 31 Desember 2018  
Dinas Kesehatan Padang Panjang

Sekretaris : M. Mardiyah



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**  
**SERTIFIKAT AKREDITASI**

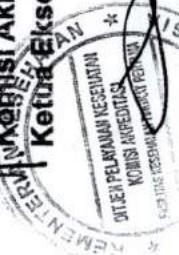
Nomor : DM.01.01/KAFKTP/ 31/2017

**Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan**  
**TERAKREDITASI**

**Kepada**

Nama Puskesmas	:	BUKIT SURUNGAN
Nomor Registrasi	:	P1374010202
Kab/Kota,Provinsi	:	Kota Padang Panjang, Sumatera Barat
Status Akreditasi	:	DASAR
Berlaku	:	20 Mei 2017 S/D 20 Mei 2020

Jakarta, 22 Juni 2017  
**KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**  
**Ketua Eksekutif**



drg. Triki Suryanti Supandi, M.Kes



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**  
**SERTIFIKAT AKREDITASI**

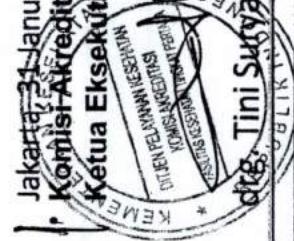
Nomor : DM.01.01/KAFKTP/302/2016

**Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan **TERAKREDITASI****

Kepada

Nama Puskesmas : KOTO KATIK  
Nomor Registrasi : P1374020202  
Kab/Kota,Provinsi : Kota Padang Panjang, Sumatera Barat  
Status Akreditasi : MADYA  
Berlaku : 4 Desember 2016 s/d 4 Desember 2019

Jakarta, 21 Januari 2017  
• Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  
Ketua Eksekutif  
drg. Tini Sugiyanti Suhandi, M.Kes





KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

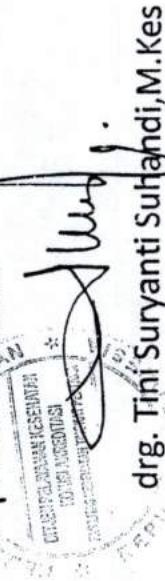
**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**KOMISI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**  
**SERTIFIKAT AKREDITASI**  
Nomor : DM.01.01/KAFKTP/ 32/2017

Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan **TERAKREDITASI**

**Kepada**  
Nama Puskesmas : GUNUNG  
Nomor Registrasi : P1374020201  
Kab/Kota,Provinsi : Kota Padang Panjang, Sumatera Barat  
Status Akreditasi : UTAMA  
Berlaku : 20 Mei 2017 S/D 20 Mei 2020

Jakarta, 22 Juni 2017  
Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  
Ketua Eksekutif



  
drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes



# PIAGAM

# PENGHARGAAN

Kegiatan UHC JKN-KIS AWARD di Istana Negara

Diberikan Kepada

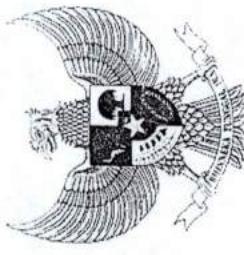
# Kota Padang Panjang

Atas Komitmennya Mendukung Tercapainya  
Universal Health Coverage (UHC) Program JKN-KIS Lebih Awal di Tahun 2018

Jakarta, 2018

Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes  
Direktur Utama BPJS Kesehatan





**PENGHARGAAN**  
**KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2018**

Kepada

*Pemerintah Kota Padang Panjang*

Kategori

**MADYA**

Surabaya, 23 Juli 2018

**Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yohana Susana Yembise".

**Yohana Susana Yembise**



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Padang Panjang**

Sebagai

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  
Kategori Baik  
Tahun 2018**

Jakarta, 27 November 2018  
Deputi Bidang Pelayanan Publik

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.



KEMENTERIAN PENDAYAUGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada  
**Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Padang Panjang**

Sebagai

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  
Kategori Baik  
Tahun 2018**

Jakarta, 27 November 2018  
Deputi Bidang Pelayanan Publik

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

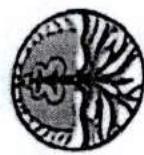
## Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang

Sebagai

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  
Kategori Baik  
Tahun 2018**

Jakarta, 27 November 2018  
Deputi Bidang Pelayanan Publik

Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.



# Sympatasi Pemkota dan ProKlim

DIBERIKAN KEPADA :

## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

Yang telah aktif melaksanakan Program Kampung Iklim di Daerah





# Sertifikat

DIBERIKAN KEPADA :  
**KELURAHAN KOTO PANJANG, KOTA PADANG PANJANG,  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SEBAGAI

## KATEGORI PROGRAM KAMPUNG IKLIM UTAMA

YANG TELAH AKTIF MELAKUKAN AKSI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SECARA TERINTEGRASI  
DAN MENDORONG REPLIKASI KEGIATAN PROKLIM KE LOKASI LAIN SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM





# Sertifikat

DIBERIKAN KEPADA :

**KELURAHAN GANTING, KOTA PADANG PANJANG,  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SEBAGAI

## KATEGORI PROGRAM KAMPUNG IKLIM UTAMA

YANG TELAH AKTIF MELAKUKAN AKSI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SECARA TERINTEGRASI  
DAN MENDORONG REPLIKASI KEGIATAN PROKLIM KE LOKASI LAIN SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

24 OKTOBER 2018  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,



# Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Suci Wuandari

Sebagai

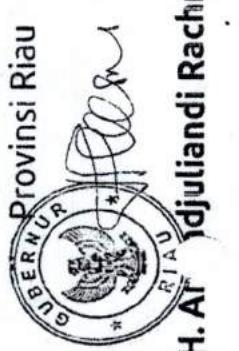
JUARA II ( DUA )  
CABOR ATLETIK

Pekan Olahraga Nasional Ke-8 Special Olympics Indonesia 2018  
**(PONNAS VIII SOIna 2018)**  
Riau , 19 - 23 Juli 2018

Ketua Umum  
Persekutuan Olahraga Pusak SOIna



Gubernur  
Provinsi Riau



Ir. H. Afidjuliandi Rachman, MBA

Prof. DR. Firdausullah, SH, M.Si,DFM

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga  
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI



Dr. R. Ishanta, M.Pd

# PIAGAM PENGHARGAAN

worl  
foo  
day

Diberikan Kepada :

Dinas Pangan dan Pertanian  
Kota Padang Panjang

Sebagai STAND TERBAIK I  
*Pameran Ketahanan Pangan Dalam Rangka Peringatan  
Hari Pangan Sedunia (HPS) ke - 38*

*Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018*  
di Lapangan Sepak Bola Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung  
Kabupaten Dharmasraya Pada Tanggal 6-8 November 2018.

Sitiung, 08 November 2018

KEPALA DINAS PANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Pembina Utama Madya  
NIP. 19630515 199003 1 006

JUARA I LOMBA MENU B2SA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

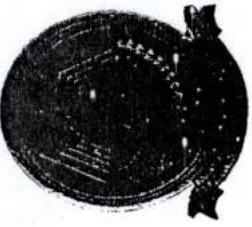


#### **KLASIFIKASI PELANGGARAN**

1. pelanggaran diklasifikasikan menjadi :
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang;
  - c. pelanggaran berat.
2. Pelanggaran klasifikasi ringan, berupa tidak membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal.
3. Pelanggaran klasifikasi sedang, berupa melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian.
4. Pelanggaran klasifikasi berat meliputi:
  - a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi pengujii;
  - b. melakukan pengujian tidak sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
  - c. melakukan pengujian tidak menggunakan peralatan uji;
  - d. peralatan pengujian tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
  - e. tenaga pengujii pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan meiakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengujian;
  - f. tidak mempunyai tenaga pengujii dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
  - g. tidak melakukn kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

1. sanksi administrasi diklasifikasikan menjadi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan; dan
  - c. pencabutan Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
2. pelanggaran klasifikasi ringan diberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis.
3. Surat peringatan, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
4. Dalam hal pemberian surat peringatan melebihi yang telah ditentukan, diberikan sanksi berupa pembekuan.
5. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembekuan, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan tidak mengindahkan kewajibannya, maka Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dicabut.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**SERTIFIKAT AKREDITASI**  
**UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5495/AJ.402/DRJD/2018 tanggal 28 November 2018 menyatakan  
bahwa :

Nama UPUBKB : UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG  
Alamat : Jl. Dr. Hamka No. 87, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

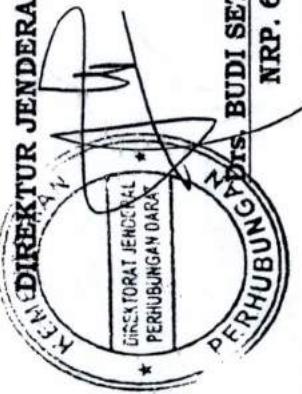
Terakreditasi dengan klasifikasi :

**AKREDITASI B**

Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal **28 November 2018**  
sampai dengan **28 November 2020**.

Jakarta, 18 Desember 2018

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**



Dr. BUDI SETIYADI, SH., M.Si  
NRP. 6205 0784

GUBERNUR SUMATERA BARAT

No. 648

PENGANUGERAHAN

Piagam Penghargaan

Kepada

Dinas Dukcapil Kota Padang

Dinas dengan Konsistensi Terbaik

PADA PENULAIAN INOVASI PELAYANAN DALAM PELAKUKAN KEGIATAN  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN DAN KOTA SE-SUMATERA BARAT  
TAHUN 2018

PADANG, 13 AGUSTUS 2018

GUBERNUR,

  
Gubernur  
Sumatera Barat

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
Dinas Kependidikan dan Pengembangan Sosial

Dinas Kependidikan dan Pengembangan Sosial  
Kota Padang Panjang

## Harapan 2

Perayaman Prima dan Inovasi Perayaman Publik  
Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Dinas Kependidikan dan Pengembangan Sosial  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

KWAN PUJIYONO

# DINAS PENDIDIKAN

## Piagam Penghargaan

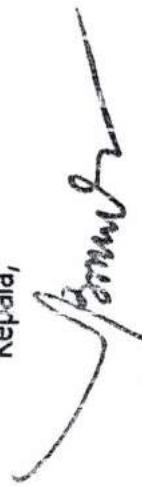
No. 861 / 965 / Sekretariat-2018

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan ini memberikan penghargaan kepada :

NAMA	: DHEA ANANDA PUTRI
SEKOLAH ASAL	: SDN 15 NGALAU
KOTA	: PADANG PANJANG

Atas Prestasinya sebagai Juara I cabang Kid's Atletik (Frog Jump/Loncat Katak Putri) dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) SD/MI Tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dari tanggal 23 s.d 27 April 2018 di Padang.

Padang, 2 Mei 2018  
Kepala,



Drs. BURHASMAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590424 198403 1 006

④



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN



## Plagam Penghargaan

No.861/2738/PSLB-2018

Diberikan Kepada :

**DONI ARMANDA**

Sebagai

Juara I

Lomba Menyarikan Buku (*synopsis*) SMPLB

Dalam Kegiatan Lomba Literasi PK-LK Tingkat Provinsi Sumatera Barat  
Tahun pelajaran 2017/2018 pada tanggal 19 s.d 22 Juli 2018.

Padang, 20 Juli 2018



Drs. BURHASMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590424 198403 1 006

# Piagam Penghargaan

NO. 861 / 1031 / Sekretariat-2018

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan ini memberikan penghargaan kepada :

**NAMA : MUHAMMAD KEMAL FARIZIY**  
**SEKOLAH : MTSN PADANG PANJANG**  
**KOTA : PADANG PANJANG**

Atas prestasinya sebagai Juara I cabang Atletik (Tolak Peluru Putra) dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dari tanggal 3 s.d 8 Mei 2018 di Padang.

Padang, 8 Mei 2018  
Kepala,

  
**Drs. BURHASMAN, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590424 198403 1 006

Nomor: 1200/01/KP/2018

# Piagam Penghargaan

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan Pusat memberikan penghargaan kepada

## Ridhaka Gina Amalia

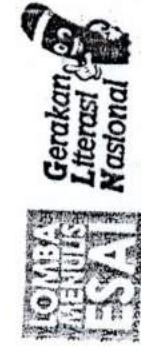
SMP Negeri 1 Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat

sebagai Finalis

pada Lomba Menulis Esai (LME) SMP Tingkat Nasional  
tanggal 27 - 31 Oktober 2018 di Jakarta.  
"Literasi Membangun Pembelajaran Sepanjang Hayat"



Jakarta, 30 Oktober 2018  
Enang Ahmad, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196607021990011001



# Sertifikat

KOTA PADANG PANJANG

Diberikan Kepada

Sebagai :

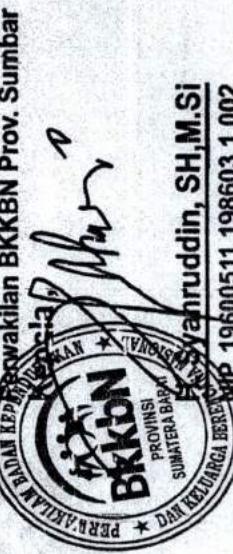
## JUARA III

... STORY TELLING GenRE ...

JAMBORE DAN AJANG TEKU KREATIFITAS CENTRE  
DAN PERKENAHAN BAKTI SAMA KENCANA TK. PROV. SUMBAR 2018

Sawahlunto, 28 S/d 31 Agustus 2018

“Menciptakan Generasi Muda Berkarakter Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”  
“PRODUKTIF DI USA PRODUKTIF”



Perwakilan BKKBn Provinsi Sumatera Barat Website: <http://sumbar.bkkbn.go.id>  
@BkkbnSumbar You BKBN Sumbar E-Mail: prov.sumbar@bkkbn.go.id



H. Syanruddin, SH, M.Si  
NIP. 19600511 198603 1 002

# Sertifikat

Diberikan Kepada

## KOTA PADANG PANJANG

Sebagai :

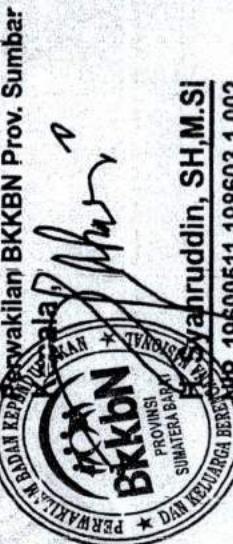
## JUARA II

LOMBA PENTAS KREASI GENRE

JALIBOLE DAN AJUNG JEMUR KRAUTIFIAS GENRE  
DAN PERKEMAHAN BAKTI SAKA KENCANA TK. PROV. SUMBAR 2018

Sawahlunto, 28 S/d 31 Agustus 2018

“Menciptakan Generasi Muda Berkarakter Yang Bertqwa Kepada Tuhan Yang Maha Ega”  
“PRODUKTIF DI USA PRODUKTIF”



Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Website: <http://sumbar.bkkbn.go.id>

@BkkbnSumbar You Tube BKKBN Sumbar E-Mail: prov.sumbar@bkkbn.go.id



# Sertifikat



Diberikan Kepada

## KOTA PADANG PANJANG

Sebagai :

## JUARA II

••• USTADUSTAD AZAH GENRE •••

AMBORO DAN AJANG TELU KREATIVE STUDIO  
DAN PERKETAHANAN BAKTI SAMA KENCANA TK, PROV. SUMBAR 2018

Sawahlunto, 28 S/d 31 Agustus 2018

“Menciptakan Generasi Muda Berkarakter Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Ega”  
“PRODUKTIF DI USA PRODUKTIF”



Ferwakilan BKKBPN Provinsi Sumatera Barat Website: <http://sumbar.bkkbn.go.id>

@BkkbnSumbar YouTube BKBN Sumbar E-Mail: prov.sumbar@bkkbn.go.id



# Sertifikat

KOTA PADANG PANJANG

Diberikan Kepada

Sebagai :

JUARA II

... PENJELAJAH / ADVENTURE

JANTIBORE DAN AJANG TEMU KREATIVITAS GENRE  
DAN PERKEMBANGAN BAKAT SAKA KENCANA IK, PROV. SUMBAR 2018

Sawahlunto, 28 & 31 Agustus 2018

“Menciptakan Generasi Muda Berkarakter Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Ega”  
“PRODUKTIF DI USIA PRODUKTIF”



Pewakilan BKKBPN Provinsi Sumatera Barat Website: <http://sumbar.bkkbn.go.id>  
@BkkbnSumbar YouTube BKKBPN Sumbar E-Mail: [prov.sumbar@bkkbn.go.id](mailto:prov.sumbar@bkkbn.go.id)  
HP. 19600511 198603 1 002



# Jiwa dan Menghadap

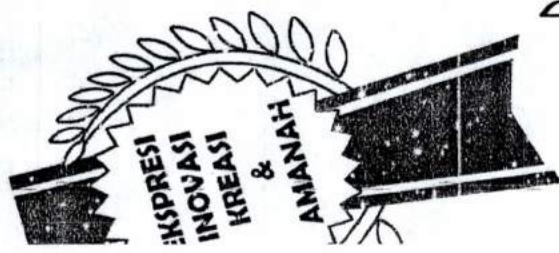
Diberikan Kepada

**FECI**

Sebagai :

## **DUTA GenRe SUMATERA BARAT TAHUN 2018**

Yang Mempunyai Pengetahuan, Pemahaman, Kemampuan dan Keterampilan Serta Siap Beraksi Nyata  
Dalam Mempromosikan dan Mensosialisasikan Program GenRe kepada Teman Sebaya/Masyarakat dan Terwujudnya  
GenRe SUMATERA BARAT yang Beretos kerja, Berintegritas dan Berjiwa Gotong Royong  
Untuk Meraih Bonus Demografi dan Indonesia Emas



Padang, 05 Mei 2018



In BKKBN Provinsi Sumatera Barat Website: <http://sumbar.bkkbn.go.id>  
Sumbar You BKKBN Sumbar E-Mail: prov.sumbar@bkkbn.go.id

**bsi**

## Assessment Conclusion

BSI Assessment team

### Assessment Report

Name	Position	Mohamad Agung Sumantir	Team Leader

## Assessment conclusion and recommendation

The audit objectives have been achieved and the certificate scope remains appropriate. The audit team concludes based on the results of this audit that the organization does fulfill the standards and audit criteria identified within the audit report and it is deemed that the management system continues to achieve its intended outcomes.

**RECOMMENDED - Corrective Action Plan Required (Minor findings only):** The audited organization may be recommended for certification / continued certification, based upon the acceptance of a satisfactory corrective action plan for all 'Minor' findings as shown in this report. Effective implementation of corrective actions will be reviewed during the next surveillance audit.

Please submit a plan to BSI detailing the nonconformity, the cause, correction and your proposed corrective action, with responsibilities and timescales allocated. The plan is to be submitted no later than 08/11/2018 by e-mail or fax to the correspondence address below, referencing the report number, or through the BSI Assurance Portal if this is enabled for your account.

## Use of certification documents, mark / logo or report

The use of the BSI certification documents and mark / logo is effectively controlled.

Menyanyi SMPB/ SMLB  
Juarai 2  
Sebagai  
Diberikan kepada :

No. 861/2758/PSLB-2018  
**Surat Penghargaan**



DINAS PENDIDIKAN  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

(12)



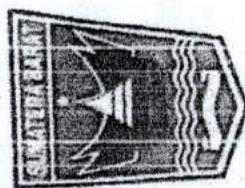
NIP. 19590424 198403 1 006

Pembina Utama Madaya

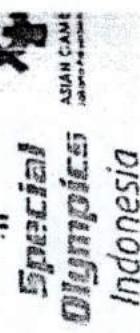
Drs. BURHASMAN, MM

Kepala,  
Padang, 30 Juli 2018

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**



(13)



Nomor : 426/III/0926/Dispora-IV/2018

Diketahui kepada :

Nama : MUTIARA SRIVERNANDA  
Cabor : RENANG LOW ABILITY  
Juara : II (DUA)

**PADA KEJUARAN DAERAH SE SUMATERA  
PADANG, 12 S.d. 15 APRIL 2018**

Ketua Pengurus Daerah  
Sonia Sumatera Barat



Padang, 15 April 2018  
Kepada

Priadi Syukur, SH, MH  
Putih Olahraga  
NIP 196106161901031007



# Diajalin Dengan Hati Qadli

Diluncurkan Kepada :

## KELompok BINA KELUARGA LANSIA BKBL ANGGREK BULAN

KOTA PADANG PANJANG  
Sebagai Terbaik I

LGMILAH APRESIASI KELompOK BINA KELUARGA LANSIA  
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL KE-XXV  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2018

Pada Tanggal : 10 Juli 2018

Gugus Ajudan Subdit Perbaikan





# PIAGAM PENGHARGAAN

ini diberikan kepada :

FESTI

dalam Kegiatan Apresiasi Duta Generasi Berencana Tingkat Nasional  
Tahun 2018 dengan tema "Bergerak, Berdaya, Berkolaborasi Dalam Karya"  
pada tanggal 23 Oktober 2018 di Mercurie Convention Center Ancol.

FINALIS

DUTA GENRE INDONESIA 2018

Plt. Kepala Badan Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Nasional



SRI MULYANI PRIYANTO, MPH

Diberikan Kepada :

SPI N I  
Koto Panjang  
Kota Pekanbaru

Oebagai

SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2018

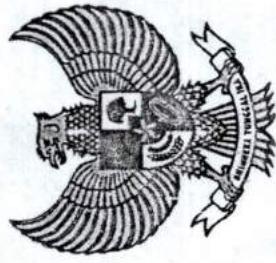
Surat Edaran  
Okttober 2018

Gubernur Sumatera Barat



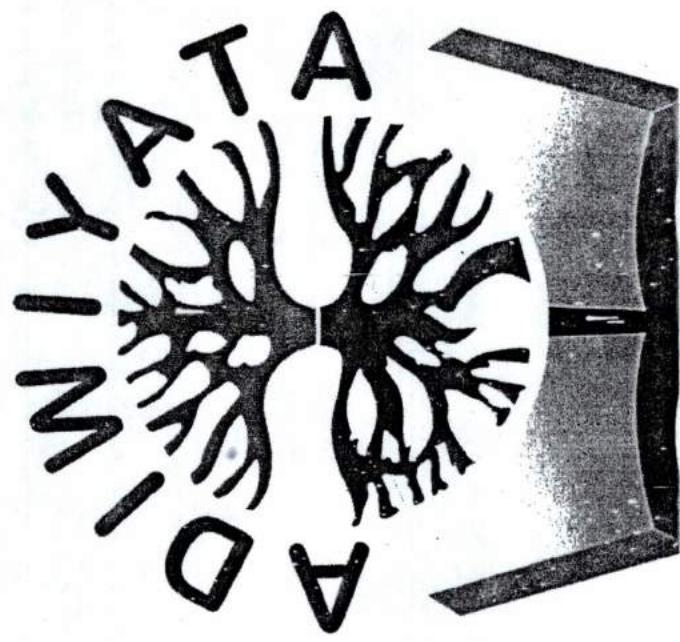
Iwan Prayitno

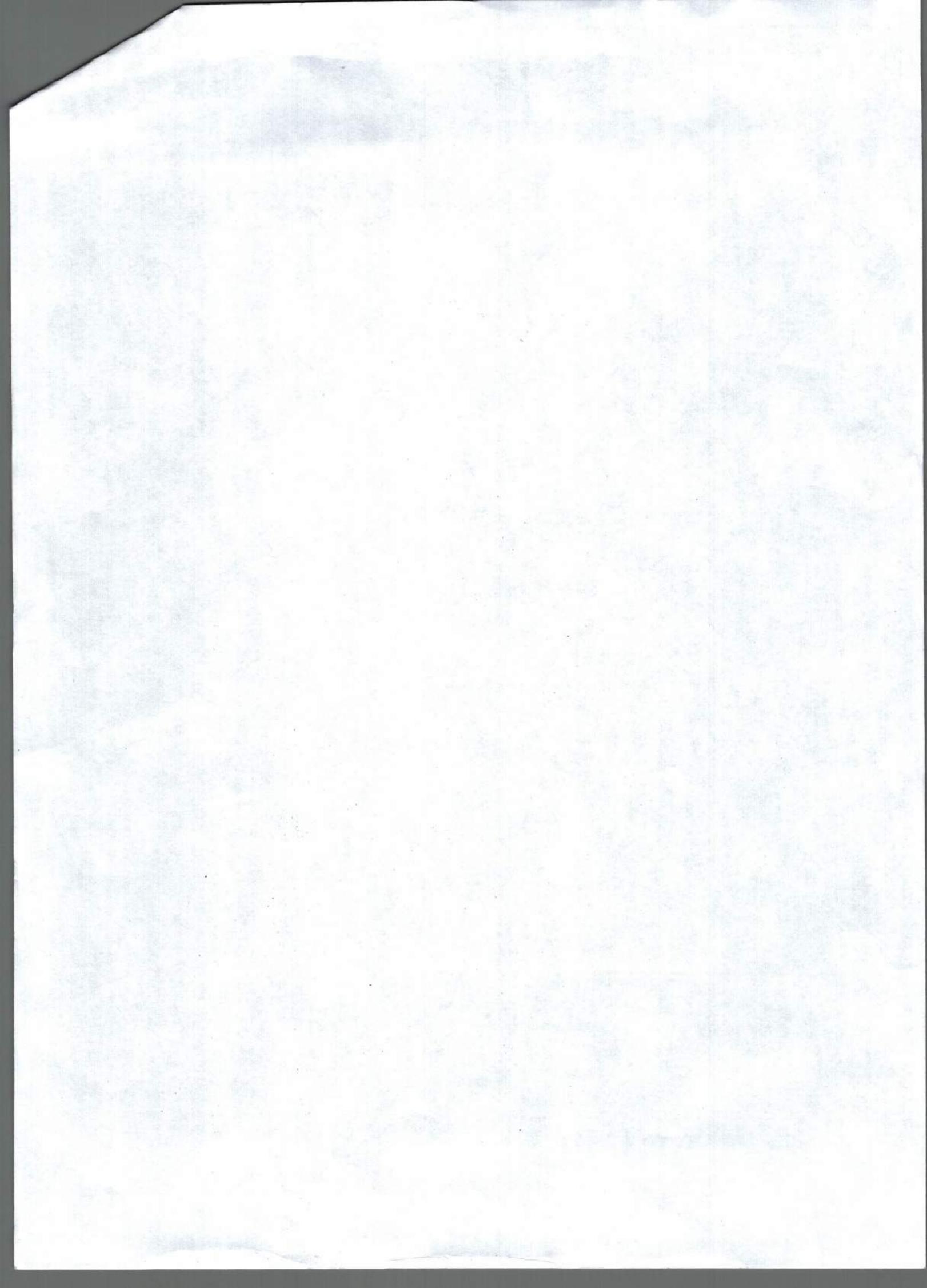
GO  
Green  
School



GUBERNUR SUMATERA BARAT

# Pidayam Perangharuan

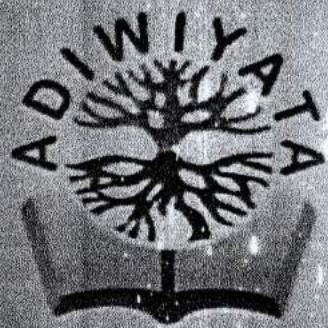






GUBERNUR SUMATERA BARAT

Jinghaqan



Ditulis di:

SDN 1S Koto Panjang  
Kota Padang Panjang

SEKRETARIAJUMINTA PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2015

